

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK DI BAWAH UMUR OLEH
ORANG TUANYA MENURUT KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Perbandingan)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

MUH. GALANG PRATAMA

NIM: 10300113164

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Galang Pratama
NIM : 10300113164
Tempat/ Tgl. Lahir : Palu/ 28 November 1995
Jur/ Prodi/ Konsentrasi : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Fakultas/ Program : Syariah dan Hukum
Alamat : Jl. Dahlia No. 17, Batangkaluku, Kab. Gowa
Judul : Tindak Pidana Pembunuhan Anak di Bawah Umur oleh
Orang Tuanya Menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam
(Studi Perbandingan)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 31 Juli 2017

Penyusun,



Muh. Galang Pratama

NIM: 10300113164

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "*Tindak Pidana Pembunuhan Anak di Bawah Umur oleh Orang Tuanya Menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam (Studi Perbandingan)*", yang disusun oleh Muh. Galang Pratama, NIM: 10300113164, mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2017 M, bertepatan dengan 16 Dzulqa'dah 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (dengan beberapa perbaikan).

Gowa, 9 Agustus 2017 M.
16 Dzulqa'dah 1438 H.

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Dra. Nila Sastrawati, M.Si	(.....)
Munaqisy I	: Prof. Dr. Darussalam, M.Ag	(.....)
Munaqisy II	: Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Hamzah Hasan, M.Hi	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Kurniati, S.Ag., M.Hi	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. Darussalam, M. Ag

NIP. 19621016 199003 1 003

Juhannis, M.A., Ph.D, selaku wakil Rektor IV UIN Alauddin Makassar yang telah memfasilitasi selama masa perkuliahan, sehingga dapat diselesaikannya pendidikan dengan baik.

3. Prof. Dr. Darussalam, M.Ag selaku Dekan, Dr. H. Abdul Halim Talli, S.Ag., M.Ag selaku wakil Dekan I, Dr. Hamsir, S.H., M.Hum selaku wakil Dekan II, dan Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag selaku wakil Dekan III pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang selama masa perkuliahan mengayomi dan memberikan petunjuk dengan penuh tanggungjawab.
4. Dra. Nila Sastrawati, M.Si dan Dr. Kurniati S.Ag., M.Hi sebagai Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (HPK) serta Staf Jurusan HPK Nursyamsi Mahmud, ST, yang telah memberikan arahan dan nasihat yang baik selama ditempuhnya pendidikan guna meraih gelar Sarjana Hukum.
5. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag, sebagai Munaqisy I dan Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag sebagai Munaqisy II yang telah memberikan evaluasi dan memudahkan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Dr. Hamzah Hasan, M.Hi selaku Pembimbing I dan Dr. Kurniati, S.Ag., M.Hi selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, membimbing dan memberikan saran yang membangun dalam penyelesaian karya tulis ilmiah ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Syariah dan Hukum, dan jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan. Terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang telah diberikan, semoga dapat bermanfaat dan berguna di masa mendatang.

8. Kepala dan para staf di perpustakaan pusat UIN Alauddin Makassar dan perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum serta perpustakaan daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah membantu dalam kebutuhan referensi skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan, khususnya mahasiswa UIN Alauddin Makassar angkatan 2013, Muh. Baso Aqil Azizi, Riswan, Rahmat, Muh. Ikhsan Sapa, Ainun Jariah, Hikmah Khairani Ibrahim, Multasyam Salmah, alumni KKN Angkatam 53 Desa Kanreapia Kec. Tombolo Pao Kab. Gowa, teman-teman jurnalis kampus, dan teman-teman lainnya yang telah menemani sejak awal hingga saat-saat kritis penyelesaian studi.
10. Kepada teman-teman di Lembaga Informatika Syariah dan Hukum (LISH), IGSMA Community, serta Komunitas Anti Rokok Mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan pengalaman kepemimpinan selama berorganisasi. Kepada semua pihak yang tidak sempat disebutkan satu per satu, yang telah berperan secara moral maupun materil selama penyusunan karya tulis. Dengan tidak mengurangi rasa hormat disampaikan banyak terima kasih. Semoga Allah swt. memberikan balasan yang lebih baik.

Akhir kata, semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca. Semoga karya ini bernilai ibadah di sisi Allah swt. dan menjadi ladang untuk beramal saleh. Amin.

Gowa, 31 Juli 2017

Penyusun,

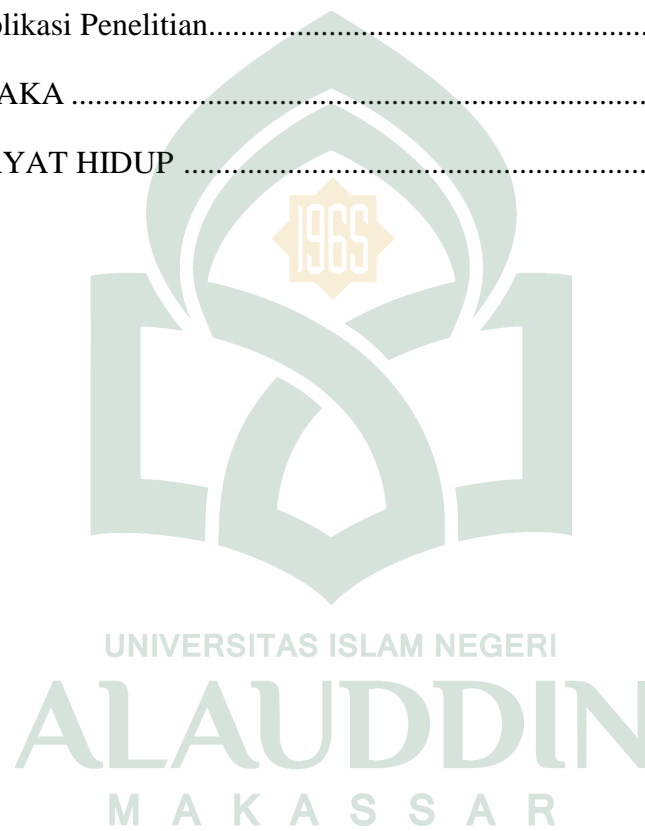
Muh. Galang Pratama

NIM. 10300113164

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1-22
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Pengertian Judul.....	11
D. Kajian Pustaka	13
E. Metodologi Penelitian.....	19
F. Tujuan dan kegunaan	21
BAB II KONSEP KEJAHATAN PEMBUNUHAN ANAK DI BAWAH UMUR OLEH ORANG TUANYA MENURUT KUHP.....	23-34
A. Tindak Pidana Pembunuhan Menurut KUHP.....	23
B. Bentuk-Bentuk Pembunuhan	29
C. Sanksi dalam Kejahatan Pembunuhan.....	33
BAB III KONSEP KEJAHATAN PEMBUNUHAN ANAK DI BAWAH UMUR OLEH ORANG TUANYA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM	35-54
A. Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam	35
B. Bentuk-Bentuk Pembunuhan	38
C. Unsur-Unsur Pembunuhan.....	42
D. Sanksi Pembunuhan.....	46

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK DI BAWAH UMUR OLEH ORANG TUANYA	55-64
A. Persamaan antara KUHP dan Hukum Pidana Islam	55
B. Perbedaan antara KUHP dan Hukum Pidana Islam	57
BAB V PENUTUP.....	65-68
A. Kesimpulan	65
B. Implikasi Penelitian.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	72



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>fat ah</i>	a	a
ي	<i>kasrah</i>	i	i
و	<i>ammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:



Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى	<i>fat ah</i> dan <i>y '</i>	ai	a dan i
و	<i>fat ah</i> dan <i>wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: *kaifa*

هَوْلَ: *hau la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ى ... ا ...	<i>fat ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah</i> dan <i>y '</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ: *m ta*

رَمَى: *ram*

قِيلَ: *q la*

يَمُوتُ: *yam tu*

4. T ' marb ah

Transliterasi untuk *t ' marb ah* ada dua, yaitu: *t ' marb ah* yang hidup atau mendapat harakat *fat ah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *t ' marb ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *t ' marb* ahdiikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaankedua kata itu terpisah, maka *t ' marb* ahituditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *rau ah al-a f l*

: الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ *al-mad nah al-f ilah*

: الْحِكْمَةُ *al- ikmah*

5. Syaddah (Tasyd d)

Syaddah atau *tasyd d* yang dalam sistem tulisan Arabdilambangkan dengan sebuahtanda *tasyd d* (ّ), dalamtransliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonanganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

: رَبَّنَا *rabban*

: نَجَّيْنَا *najjain*

: الْحَقَّ *al- aqq*

: نَعْمَ *nu“ima*

: عُدُّوْ *‘aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahuluioleh huruf *kasrah* (ى) maka ia ditransliterasi seperti huruf*maddah* menjadi ī.

Contoh:

: عَلَيَّ *‘Al* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aly*)

: عَرَبِيَّ *‘Arab* (bukan *‘Arabiyy* atau *‘Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkandengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika iadiikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Katasandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dandihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَة : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَة : *al-falsafah*

الْبِلْد : *al-bil du*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'mur na*

النَّوْع : *al-nau'*

سَيِّء : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat

yang sudah lazim dan menjadibagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fil al-Qur' n

Al-Sunnah qabl al-tadw n

9. *Laf al-Jal lah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mu filaih* (frasanominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

الله دین dīnullāh بالله billāh

Adapun *t ' marb ahdi* akhir kata yang disandarkan kepada *Laf al-Jal lah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هم في رحمة الله hum f ra matill h

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenakan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri

tersebut, bukan huruf awal katasandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari katasandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa m Mu ammadun ill ras l

Inna awwala baitin wu i'a linn si lalla bi Bakkatamub rakan

Syahru Rama n al-la unzila f h al-Qur' n

Na r al-D n al- s

Ab Na r al-Far b

Al-Gaz l

Al-Munqi min al- al l

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Ab* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *sub nah wa ta' l*

saw. = *allall hu 'alaihi wa sallam*

a.s.	=	' <i>alaihi al-sal' m</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat



ABSTRAK

Nama : Muh. Galang Pratama

NIM : 10300113164

**Judul : Tindak Pidana Pembunuhan Anak di Bawah Umur Oleh Orang Tuanya
Menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam (Studi Perbandingan)**

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mengetahui konsep KUHP tentang kejahatan pembunuhan anak di bawah umur oleh orang tuanya, 2) mengetahui konsep Hukum Pidana Islam terhadap kejahatan pembunuhan anak di bawah umur oleh orang tuanya, dan 3) mengetahui analisis perbandingan antara KUHP dan Hukum Pidana Islam tentang kejahatan pembunuhan anak di bawah umur oleh orang tuanya.

Dalam menjawab permasalahan tersebut, digunakan pendekatan yuridis dan pendekatan syar'i. Penelitian ini tergolong *library research* atau studi kepustakaan, data dikumpulkan dengan mengutip, dan menganalisis dengan menggunakan analisis perbandingan (*comparative analysis*) terhadap literatur yang representatif dan mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas antara lain yang berasal dari sumber hukum seperti al-Qur'an dan hadis, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan tindak pidana pembunuhan anak di bawah umur serta tentang peradilan anak di Indonesia lalu sumber-sumber itu diulas, dan disimpulkan.

Setelah mengadakan analisis didapatkan hasil bahwa pelaku harus tetap mendapatkan sanksi sesuai Undang-Undang. Meskipun dalam aturan *qish sh* dikatakan bahwa "orang tua tidak dihukum dengan sebab membunuh anaknya", tetapi dalam penelitian ini pelaku harus tetap mendapatkan hukuman pokok yakni maksimal 15 tahun penjara sesuai aturan yang terdapat dalam KUHP Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa. Sebab jika tidak dihukum penjara, maka dikhawatirkan akan sering terjadi kejahatan-kejahatan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya.

Adapun implikasi dari penelitian ini yakni sebaiknya ada perhatian dari masyarakat. Dibutuhkan penanaman nilai-nilai agama dan moral bagi setiap individu agar terhindar dari sifat untuk melakukan tindak pidana. Kepada pemerintah dan para aparat hukum agar mengupayakan pada korban untuk mendapatkan kepastian hukum. Sehingga setiap manusia tetap bisa menghargai adanya seorang anak. Sanksi yang diberikan harus sesuai hukuman yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi salah satu pilihan terbaik dalam mengurangi kasus pembunuhan anak di bawah umur oleh orang tuanya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum.¹ Hal itu mengartikan bahwa seluruh aspek kehidupan di Negara ini diatur berdasarkan aturan hukum (*rule of law*). Hukum dibuat, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki perdamaian.²

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya.³ Hukum pidana ini mengandung aturan-aturan. Aturan-aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum.

Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan pidana hukuman yang merupakan sanksi (*punishment*) bagi yang bersangkutan. Kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat terdiri dari berbagai bentuk dan jenis. Hal ini secara tegas diatur dalam Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan.

Salah satu contoh bentuk kejahatan adalah tindak pidana pembunuhan, yang salah satunya diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menyatakan:

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun.”⁴

Pembunuhan merupakan tindak pidana yang sangat berat dan cukup mendapat perhatian di dalam masyarakat. Berita di media baik media daring (dalam jaringan)

¹Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar 1945*, bab I, pasal 1 ayat (3).

²LJ. van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2013), h. 10.

³Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 2.

⁴Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Yogyakarta, Penerbit Pustaka Yustisia, 2007) h. 102.

maupun media cetak sudah sering memberitakan terjadinya pembunuhan. Bahkan kejahatan terhadap nyawa ini sudah sejak dulu dibahas dalam undang-undang di Indonesia.

Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan obyek kejahatan ini adalah nyawa (leven) manusia. Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 dasar, yaitu: (1) atas dasar unsur kesalahannya dan (2) atas dasar obyeknya (nyawa).⁵

Tindak pidana pembunuhan dikenal dari zaman ke zaman dan karena beragam faktor yang melatarbelakangi. Dewasa ini tindak pidana pembunuhan malah makin banyak terjadi. Tindak pidana pembunuhan berdasarkan sejarah sudah ada sejak dahulu, atau dapat dikatakan sebagai kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri.

Realitasnya negara Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai tingkat kriminalitas yang tinggi sehingga diperlukan upaya keras dari para penegak hukum untuk mengatasi masalah ini guna memberikan rasa aman kepada masyarakat. Tingginya tingkat kriminalitas ini dipengaruhi banyak hal, baik itu dari segi kesejahteraan masyarakat, pendidikan, ekonomi maupun budaya. Negara Indonesia menjamin perlindungan terhadap nyawa setiap warga negaranya, baik dari yang ada di dalam kandungan sampai yang meninggal. Tujuannya adalah untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dalam suatu perbuatan khususnya yang dilakukan dengan cara merampas orang lain (membunuh). Membunuh jika dipandang dari sudut agama merupakan suatu yang terlarang, pembunuhan merupakan suatu perbuatan atau

⁵Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa* (Cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 55.

tindakan yang tidak manusiawi dan suatu perbuatan yang tidak berperikemanusiaan karena pembunuhan merupakan suatu tindak pidana terhadap nyawa orang lain tanpa mempunyai rasa kemanusiaan.

Umar Syihab dalam Kartini (2012) mengatakan semua manusia di dunia mempunyai hak hidup. Hidup itu sendiri merupakan karunia Allah. Oleh karena itu, tidak seorangpun yang berhak merampasnya, kecuali berdasarkan kebenaran dan ketentuan dari Allah.⁶

Pembunuhan juga merupakan suatu perbuatan jahat yang dapat mengganggu keseimbangan hidup, keamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang mengancam keamanan dan keselamatan atas nyawa seseorang tersebut sehingga dianggap sebagai kejahatan yang berat oleh karena itu dijatuhi dengan hukuman yang berat pula.

Perkembangan peradaban dan pertumbuhan pada masyarakat cukup pesat, kejahatan ikut mengiringi dengan cara-cara yang telah berkembang pula. Kejahatan senantiasa ada dan terus mengikuti perubahan.

Pengaruh modernisasi tak dapat dielakkan, disebabkan oleh ilmu pengetahuan yang telah mengubah cara hidup manusia dan akhirnya hanya dapat untuk berusaha mengurangi jumlah kejahatan serta membina penjahat tersebut secara efektif dan intensif. Maka sulit kalau dikatakan negara akan melenyapkan kejahatan secara total. Emile Durkheim menyatakan bahwa kejahatan adalah:⁷

⁶Kartini, *HAM dalam Perspektif Syariah dan Deklarasi PBB* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 188.

⁷Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987), h. 1.

“Suatu gejala normal di dalam setiap masyarakat yang bercirikan heterogenitas dan perkembangan sosial dan karena itu tidak mungkin dapat dimusnahkan sampai tuntas.”

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.⁸

Hal ini disebabkan karena anak merupakan pemegang estafet pembangunan bangsa di masa yang akan datang. Sehingga tumbuh kembang seorang anak menjadi suatu persoalan yang harus diperhatikan secara saksama. Anak pun memiliki peranan strategis dan karakteristik tersendiri, sehingga diperlukan pembinaan dan perlindungan demi tercapainya pertumbuhan fisik, mental dan sosial seperti yang diharapkan.

Hakekat kedudukan anak adalah tidak saja sebagai rahmat, tetapi juga sebagai amanah dari Allah swt. Dikatakan rahmat karena anak adalah pemberian Allah swt. yang tidak semua orang tua mendapatkannya. Allah menganugerahi anak hanya bagi keluarga yang dikehendakinya. Di sekeliling kita terkadang terlihat ada keluarga yang begitu ingin memiliki anak sampai menghabiskan biaya banyak untuk

⁸Republik Indonesia, “Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” dalam *Undang-Undang Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Penerbit New Merah Putih, t.th.), h. 51-52.

mengupayakannya. Akan tetapi karena Allah belum berkehendak, ia tetap belum dikaruniai anak. Sebagai amanah berarti ada kewajiban semua pihak untuk memberikan perlindungan pada anak, khususnya pemerintah pada level komunal dan orang tua pada level individual.⁹

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dan tindakan kekerasan serta diskriminasi sanksi pidana. Anak wajib dilindungi dan dijaga kehormatannya, martabat, serta harga dirinya secara wajar baik itu secara hukum, ekonomi, sosial maupun budaya dengan tidak membedakan suku, agama, ras dan golongan. Selain itu anak harus diperlakukan khusus tumbuh dan berkembangnya secara wajar baik jasmani maupun rohani.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non-diskriminasi kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.¹⁰

Hal tersebut dipertkuat lagi di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 2 bahwa: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

⁹Burhanuddin, “Pemenuhan Hak-hak Dasar Anak dalam Perspektif Hukum Islam”, *Adliya* 8, no. 1 (2014): h. 286.

¹⁰Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Semarang: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), h. 1.

diskriminasi.” Perlindungan anak tersebut dilakukan dengan satu tujuan yakni untuk menciptakan kondisi supaya setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhannya dengan baik. Hal ini merupakan perwujudan dari adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan hilangnya kreatifitas, dan hal lain yang dapat menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak menjadi tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan pelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar.¹¹ Anak-anak harus dibiarkan hidup, karena peran anak bisa menjadi peran pelanjut usaha bagi orang tuanya ke depan.

Berdasarkan hasil seminar perlindungan anak/remaja oleh Prayuna Pusat tanggal 30 Mei 1977 yang dikutip dalam buku Maidin Gultom, mengatakan, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak yaitu :¹²

1. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan,

¹¹Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), h. 35.

¹²Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, h. 35.

penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.

2. Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintahan dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.”

Sehingga dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik itu dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah yang merupakan subjek dari negara. Pasal 20 UU No. 23 Tahun 2002 menentukan: “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”¹³

Di dalam KUHP Pasal 338 pun sudah ada larangan terhadap pembunuhan. Namun ini masih saja terjadi di masyarakat. Kekerasan pada yang menyebabkan kematian ini sudah banyak terjadi di Indonesia. Kasus ini pun meningkat di tiap tahunnya.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan, kekerasan pada anak selalu meningkat setiap tahun. Hasil pemantauan KPAI dari 2011 sampai 2015, terjadi peningkatan yang signifikan. “Tahun 2011 terjadi 2178 kasus kekerasan, 2012 ada 3512 kasus, 2013 ada 4311 kasus, 2014 ada 5066 kasus dan 2015 tercatat ada 6006 kasus,” kata Wakil Ketua KPAI, Maria Advianti kepada Harian Terbit,

¹³Pasal 20 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Minggu (14/6/2015).¹⁴ Dia memaparkan, pelaku kekerasan pada anak dibagi menjadi tiga. Pertama, orang tua, keluarga, atau orang yang dekat di lingkungan rumah. Kedua, tenaga kependidikan yaitu guru dan orang-orang yang ada di lingkungan sekolah seperti *cleaning service*, tukang kantin, satpam, sopir antar jemput yang disediakan sekolah. Ketiga, orang yang tidak dikenal. Berdasarkan data KPAI tersebut, anak korban kekerasan di lingkungan masyarakat jumlahnya termasuk rendah yaitu 17,9 persen.

Artinya, anak rentan menjadi korban kekerasan justru di lingkungan rumah dan sekolah. Lingkungan yang mengenal anak-anak tersebut cukup dekat. Artinya lagi, pelaku kekerasan pada anak justru lebih banyak berasal dari kalangan yang dekat dengan anak. Selain menjadi korban kekerasan, data di bawah ini juga memberikan gambaran tersendiri terkait kasus pembunuhan yang menimpa anak-anak. Sebagaimana Opini Bagong Suyanto di Koran Republika edisi 12 Februari 2016:

Tren penculikan dan pembunuhan yang menimpa anak-anak belakangan ini cenderung makin mencemaskan. Data Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mencatat, paling tidak 160 laporan kematian anak yang didahului penculikan. Dari 160 kasus pembunuhan anak, sebanyak 121 kasus di antaranya yang terjadi sepanjang 2015 didahului dengan tindak penculikan. Sejak Januari 2016 hingga awal Februari ini, tercatat sudah ada 39 kasus kematian anak yang didahului dengan penculikan (Republika, 10 Februari 2016).¹⁵ Dari kenyataan itu, dapat diketahui

¹⁴Davit Setyawan, "KPAI: Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Tiap Tahun Meningkat", *KPAI Online*. <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/> (14 November 2016).

¹⁵Bagong Suyanto, "Penculikan dan Pembunuhan Anak", *Koran Republika Online*. 12 Februari 2016. <http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/16/02/12/o2ff341-penculikan-dan-pembunuhan-anak> (18 November 2016).

bahwa terjadinya kasus pembunuhan anak di bawah umur dipengaruhi oleh banyak hal. Sedangkan cara penanggulangnya masih belum menemui titik terang. Seharusnya di sinilah peranan agama dalam menemukan solusi terhadap kejahatan pembunuhan.

Pemikiran tentang jaminan hak anak serta perlindungannya perlu dimulai pada perbaikan pola pembinaan anak dalam masyarakat kita, dengan mendasarkan kepada kasih sayang dan cinta yang tulus dan murni dari orang tua, yang pada gilirannya akan menumbuhkan rasa kasih sayang dan cinta kepada sesama manusia pada jiwa sang anak di kemudian hari. Beranjak dari sini, maka terbentuk suatu masyarakat yang memiliki kesejahteraan, ketenteraman dan stabilitas yang tinggi.¹⁶

Islam memberi berbagai hak dasar kepada manusia, termasuk hak untuk hidup. Dalam syari'ah terdapat isyarat yang amat nyata dan jelas bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup, memperoleh martabat kehidupan yang sama di hadapan Tuhan.¹⁷ Sebagaimana Allah berfirman dalam QS al-Isr /17: 31.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.”¹⁸

Menurut Quraish Shibab dalam tafsir *al-Mishb h*, larangan ayat ini ditujukan kepada umum. Ini dipahami dari bentuk jamak yang digunakannya, (*janganlah kamu*) – seperti juga ayat-ayat berikut, berbeda dengan ayat-ayat yang lalu yang

¹⁶Wagiati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: PT Refika Aditama, 2006) h. 73

¹⁷Kurniati, *HAM dalam Perspektif Syari'ah dan Deklarasi PBB*, h. 189.

¹⁸Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Surabaya: UD. Halim, 2010), h. 285.

menggunakan bentuk tunggal (*janganlah engkau*). Agaknya hal tersebut mengisyaratkan bahwa keburukan yang dilarang di sini dan ayat-ayat yang menggunakan bentuk jamak itu, adalah keburukan yang telah tersebar di dalam masyarakat Jahiliyah, atau penggunaan bentuk jamak itu untuk mengisyaratkan bahwa apa yang dipesankannya merupakan tanggung jawab kolektif, berbeda dengan yang berbentuk tunggal. Bentuk tunggal memberikan penekanan pada orang perorang, serta merupakan tanggung jawab pribadi demi pribadi. Demikian M. Quraish Shihab.¹⁹

Dari penjelasan ayat tersebut, dijelaskan bahwa membunuh anak-anak adalah larangan. Allah sudah jelas memberikan pemahaman bahwa rezeki seorang anak ditanggung oleh-Nya. Manusia hanya bisa berusaha dan bertawakkal.

Oleh karenanya, dibutuhkan peran semua pihak demi merealisasikan pesan-pesan yang dikandung di dalam al-Qur'an demi menjawab segala permasalahan tindak kejahatan pembunuhan anak oleh orangtuanya. Selain itu, hal yang mesti dijawab saat ini yaitu apakah karena KUHP yang dipakai di Indonesia dalam menjatuhkan hukum tidak mampu mengurangi jumlah korban pembunuhan anak, atau karena peran hukum pidana Islam saat ini yang belum memberikan sumbangsih besar dalam penanganan sanksi terhadap pembunuhan anak di bawah umur.

Berdasarkan latar belakang tersebut, akan dianalisis cara penanggulangan terjadinya kasus pembunuhan anak di bawah umur dalam kaitannya dengan Tindak Pidana Pembunuhan Anak di Bawah Umur oleh Orang Tua Menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam (Studi Perbandingan).

¹⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishb h: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol. VII* (Cet. I; Jakarta: Lentera hati, 2002), h. 456.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan pokok masalah sebagai berikut. Bagaimana sanksi yang diberikan kepada pelaku pembunuhan anak di bawah umur yang dilakukan oleh orang tuanya. Pokok permasalahan ini akan dianalisis ke dalam beberapa sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep KUHP tentang kejahatan pembunuhan anak di bawah umur oleh orang tuanya?
2. Bagaimana konsep Hukum Pidana Islam tentang kejahatan pembunuhan anak di bawah umur oleh orang tuanya?
3. Bagaimana analisis komparatif antara KUHP dan Hukum Pidana Islam tentang kejahatan pembunuhan anak di bawah umur oleh orang tuanya?

C. Pengertian Judul

1. Pengertian Judul

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengidentifikasi dan memahami pengertian terhadap judul Tidak Pidana Pembunuhan Anak di Bawah Umur Menurut KUHP dan Hukum pidana Islam, maka perlu dijelaskan istilah-istilah teknis tersebut, sebagai berikut:

- a. Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.²⁰

²⁰Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003), h. 1.

- b. Pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang.²¹ Jika dilihat dari Kamus Umum Bahasa Indonesia Pembunuhan secara terminologi adalah perkara membunuh; perbuatan (hal, dsb) membunuh²². Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain.²³
- c. Anak di bawah umur. Dalam kajian aspek hukum pidana, persoalan untuk menentukan kriteria seorang anak walaupun secara tegas didasarkan pada batas usia, namun apabila diteliti beberapa ketentuan dalam KUHP yang mengatur masalah batas usia anak, juga terdapat keanekaragaman. Menurut Pasal 45 KUHP seseorang yang dikategorikan berada di bawah umur atau belum dewasa apabila ia belum mencapai umur 16 tahun. Pasal 283 KUHP menentukan batas kedewasaan apabila sudah mencapai 17 tahun. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 287 KUHP, batas umur dewasa bagi seorang wanita adalah 15 tahun.²⁴
- d. Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat.²⁵

²¹Wahbah Zuhali, *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu* (Demaskus: Juz VI Dar al Fikr, 1989), h. 217.

²²W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Cet. V; Jakarta: Balai Pustaka, 1982), h. 169.

²³P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus* (Cet. I; Bandung: Bina Cipta, 1986), h. 1.

²⁴Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak* (Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 7.

²⁵Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994), h. 155.

- e. KUHP yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku sebagai dasar hukum di Indonesia.²⁶
- f. Hukum Pidana Islam yaitu hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis atau syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.²⁷

Berdasarkan definisi istilah-istilah yang diambil dari variabel dalam judul skripsi ini dapat disimpulkan makna tentang Tindak Pidana Pembunuhan Anak di Bawah Umur Menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam agar pembahasan tidak keluar dari pokok permasalahan yang dibahas di dalam skripsi ini.

2. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional dari penelitian ini adalah pelanggaran norma hukum dalam hal hilangnya nyawa seorang anak di bawah umur oleh orang tuanya menurut KUHP dan hukum pidana Islam.

D. *Kajian Pustaka*

Dalam skripsi ini digunakan beberapa literatur kepustakaan yang memiliki hubungan dengan masalah-masalah yang sedang diajukan dalam karya ilmiah ini. Dari segi buku-buku yang sejauh ini didapatkan, masih belum ada ada buku-buku yang memiliki kesamaan dengan pembahasan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Seperti di dalam beberapa referensi berikut ini:

Maidin Gultom, dalam bukunya Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia banyak membahas tentang perumusan-perumusan tentang perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. Buku ini

²⁶Soenarto Soerodibroto, *KUHP* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. VI.

²⁷Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 1.

mengungkap banyak tentang sistem peradilan pidana anak di Indonesia beserta kritiknya pada sistem peradilan pidana anak. Kelebihan buku ini adalah karena memaparkan lebih banyak tentang sistem peradilan anak dan aturan serta tata acara peradilan menimpa anak-anak. Akan tetapi, buku ini belum mengupas lebih jauh tentang masa depan dari kompensasi yang didapatkan anak sebagai korban dari tindak pidana pembunuhan. Bukan hanya dari segi materil dan non materil melainkan juga dari segi jiwa dan masalah psikologi lain yang mengenai pada keluarga si anak yang menjadi korban.

Angger Sigit Pramukti dan Fuady dalam bukunya *Sistem Peradilan Pidana Anak* membahas tentang kompetensi, asas-asas, dan sejarah pembentukan peradilan pidana anak dalam perbandingannya dengan undang-undang. Selain itu buku ini juga membahas tentang hak dan kewajiban anak. Dalam hukum pidana nasional Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak anak dapat dijumpai dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sebagai contohnya dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang merupakan ratifikasi dari konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak.²⁸ Kelebihan buku ini yakni karena menitikberatkan pada hak-hak anak yang menjadi pelaku tindak pidana atau yang berhadapan dengan peradilan pidana anak. Namun buku ini tidak membahas bagaimana menjamin dan melindungi hak anak sebagai korban tindak pidana.

Bagong Suyanto dalam bukunya *Masalah Sosial Anak* secara garis besar berisi tentang masalah-masalah anak. Baik itu anak rawan, anak yang dilacurkan, anak jalanan, anak telantar, perdagangan dan penculikan anak, anak kasus pedofilia

²⁸ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2015), h. 11.

dan pemahaman tentang anak korban *child abuse* beserta faktor penyebabnya. Istilah *Child abuse* sendiri dipakai untuk menggambarkan kasus anak-anak di bawah usia 16 tahun yang mendapat gangguan dari orang tua atau pengasuhnya dan merugikan anak secara fisik dan kesehatan mental serta perkembangannya.²⁹ Kelebihan dalam buku ini penulisnya banyak membahas tentang kekerasan dan tindak pidana yang menimpa anak di bawah umur. Akan tetapi, buku ini tidak membahas tentang tindak pidana pembunuhan yang dialami oleh anak.

Marlina dalam bukunya *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* membahas tentang bagaimana pengembangan konsep diversifikasi dan restorative justice bagi anak sebagai pelaku dalam kasus pidana. Buku ini membahas tentang seluk beluk teori (pendapat-pendapat ahli) tentang anak dan beberapa dilampirkan kasus pidana anak sebagai tersangka, perlindungan hukum anak pelaku tindak pidana, perbuatan delinkuen, serta pencarian penyelesaian atas masalah itu dengan penawaran konsep Diversifikasi dan Restorative Justice-nya.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo (2002) sebagaimana yang dikutip Marlina mengatakan bahwa seorang delinkuen sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Namun, keterbatasannya karena buku ini belum banyak membahas tentang bagaimana perlindungan hak bagi anak sebagai korban tindak pidana.

Wagiati Sutedjo dalam bukunya *Hukum Pidana Anak*, buku ini menjelaskan tentang kenakalan anak, prosedur pemeriksaan anak di muka sidang, serta beberapa masalah terhadap tindakan kenakalan anak. Kelebihan dari buku ini karena

²⁹Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), h. 28.

membahas tentang hak-hak anak atas perlindungan hukum, seperti konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga si anak, namun juga mencakup perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya. Namun yang menjadi titik keterbatasan dari buku ini yang sebaiknya ditambah adalah pemberian pembahasan terkait dengan hak-hak anak yang menjadi korban atas hukum dan pelaku yang melakukan tindak pidana berasal dari keluarga.

Irma Setyowati Soemitro dalam bukunya *Aspek Hukum Perlindungan Anak* menjelaskan secara besar tentang ruang lingkup perlindungan anak, mulai dari deklarasi hak-hak anak, ketentuan Undang-Undang yang mengatur hak-hak anak, pengertian anak dalam hukum perdata, dalam hukum kebiasaan serta sampai pada kegunaannya dalam pembangunan hukum nasional. Akan tetapi, keterbatasan dalam buku ini adalah pembahasannya yang masih konvensional terhadap permasalahan yang menyangkut anak di era modern seperti sekarang ini.

Nandang Sambas dalam bukunya *Peradilan Pidana Anak*, buku ini menjelaskan tentang seluk beluk masalah tentang *delinquen* (perilaku kriminalitas) anak di Indonesia, instrumen perlindungan anak serta penerapannya di Indonesia. Buku ini dalam berbagai pendekatan, mulai memberikan definisi terkait apa yang dimaksud dengan anak. Diambililah pengertian dalam berbagai pendekatan seperti pendekatan sosiologis, psikologis, dan secara yuridis. Kelebihan yang ada pada buku ini karena banyak dibahas mengenai perkembangan peradilan anak dan pengaturan serta jenis-jenis pidana anak di berbagai negara. Setiap masyarakat mempunyai sistem kelembagaan dalam menangani kejahatan dan kenakalan yang merupakan

reaksi terhadap terjadinya kejahatan dan kenakalan. Sistem kelembagaan yang dimaksud adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, *Custodial institution*, dan metode supervisi serta pembinaan pelaku tindak pidana (*Treatment of Offender*) dalam masyarakat. Tujuan dari reaksi terhadap kejahatan dan kenakalan adalah sebagai perlindungan masyarakat (*social defence*) untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), dalam arti sempit sebagai pencegahan terhadap kejahatan dan kenakalan serta resosialisasi petindak pidana.³⁰ Akan tetapi, di buku ini belum diulas lebih jauh terkait kepentingan yang didapat oleh korban kriminalitas. Buku ini fokus pada persoalan kasus yang mana anak menjadi pelaku kriminalitas.

Zainuddin Ali dalam bukunya hukum pidana Islam secara garis besar membahas tentang sumber, unsur, dan ciri-ciri hukum pidana Islam, perbuatan membunuh serta studi perbandingan antara hukum pidana Islam dengan hukum terhadap kejahatan pembunuhan dan konsep hukum pidana Islam mengenai perlindungan masyarakat dalam situasi damai dan konflik bersenjata. Namun, keterbatasan dalam buku ini tidak membahas tentang tindak pidana pembunuhan anak di bawah umur oleh orang tuanya menurut KUHP dan hukum pidana Islam.

Hamzah Hasan dalam bukunya Hukum Pidana Islam 1 buku ini berisi gambaran tentang dasar-dasar hukum pidana Islam. Hal ini terlihat dari pembahasannya dimulai dari dasar dari adanya hukuman itu sendiri seperti tindakan kriminal atau yang diartikan sebagai Jinayah dan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah swt. atau yang disebut sebagai Jarimah. Selain itu, di buku ini juga dijelaskan tentang asas legalitas dalam hukum pidana Islam, beberapa macam jarimah, bentuk-bentuk tindak pidana, pertanggungjawaban pidana serta membahas

³⁰Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak*, h. 100.

secara detail terkait hukuman mulai dari pengertian, dasar-dasar hukuman, tujuan, syarat, sampai pada penanggulangan tindak pidana dan gabungan hukuman itu sendiri. Meskipun, salah satu materi yang menjadi poin tambahan dalam buku ini yaitu dibahas tentang sebab dan tingkatan pertanggungjawaban pidana dan hapusnya pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam. Akan tetapi, buku ini tidak membahas tindak pidana pembunuhan secara mendalam, bentuk-bentuk tindak pidana pembunuhan, unsur-unsur pembunuhan, sanksi pembunuhan dalam hukum pidana Islam yang mana pembunuhan itu dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya.

Dari beberapa literatur tersebut belum ada yang menjelaskan secara kongkrit yang menyangkut tentang bagaimana mengembalikan hak-hak anak yang menjadi korban pelanggaran pidana. Juga bagaimana penerapan sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang berasal dari kalangan keluarga, utamanya orang tua. Hal ini penting untuk mengetahui sanksi pidana baik dalam hukum pidana nasional maupun dalam hukum pidana Islam yang didapat oleh si pelaku sebagai efek jera. Sehingga pembunuhan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tuanya bisa berkurang di masa-masa yang akan datang. Referensi terkait dengan bagaimana hukum mampu menjamin para korban juga masih sangat kurang.

Saat ini sudah banyak buku yang membahas tentang hak-hak perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana, namun masih sedikit buku atau referensi yang menyangkut tentang orang tua sebagai pelaku kejahatan pembunuhan anak dan sanksi yang diterapkan bagi si pelaku pembunuhan anak, agar konsep pemberian efek jera maksimal baik menurut KUHP maupun hukum pidana Islam dapat terpenuhi. Sehingga dibutuhkan buku-buku atau teori-teori baru untuk mendukung agar terciptanya kestabilan hukum yang adil bagi anak sebagai korban tindak pidana.

E. Metodologi Penelitian

Sebagai syarat utama karya ilmiah, maka sebuah tulisan harus memiliki metodologi.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research* atau studi kepustakaan, sebagai model tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif.³¹ Studi kepustakaan merupakan sumber data merupakan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan yaitu:

a. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji suatu perundang-undangan yang tentunya terkait dalam pembahasan perlindungan hukum terhadap anak pelaku pembunuhan dalam proses peradilan pidana anak. Baik yang terdapat di dalam KUHP maupun pada peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Pendekatan Syari'i

Pendekatan Syari'i yaitu pendekatan dengan menggunakan ilmu Syari'ah terkhusus fiqh Islam yang terkait dengan masalah Jinayah yang termaksud di dalamnya membahas mengenai pembunuhan, serta sanksi-sanksi yang menjeratnya.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan bahan-bahan yang diperoleh dari data-data atau bahan hukum primer dan sekunder.

³¹Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Alfabeta: Bandung, 2015), h. 123.

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Al-Qur'an dan Sunnah.
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI) 1945.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan
- 4) Peraturan Perundang-Undangan yang kaitannya dengan tindak pidana pembunuhan anak serta tentang peradilan anak di Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Hasil penelitian hukum yang kaitannya dengan anak sebagai korban pembunuhan.
- 2) Buku-buku hukum yang kaitannya dengan hukum pidana anak serta masalah sosial anak.

c. Bahan Hukum Tertier

Hasil penelitian atau buku-buku yang bukan hukum, namun dapat membantu untuk menjelaskan bahan hukum sekunder. Seperti kamus, jurnal, ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

- 1) Identifikasi Data yaitu dengan mengumpulkan beberapa literatur, kemudian memisahkan data yang akan dibahas.
- 2) Editing Data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menentukan jawaban pokok permasalahan.

b. Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan yaitu analisis komparatif (*comparative analysis*) yaitu menguraikan sumber yang satu dengan sumber lainnya setelah itu keduanya dihadapkan untuk diperbandingkan untuk diambil suatu kesimpulan. Metode analisis komparatif atau analisis perbandingan ini akan digunakan untuk menganalisis tindak pidana pembunuhan anak di bawah umur oleh orang tuanya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum pidana Islam.

F. Tujuan dan Kegunaan

Pada bagian ini dijelaskan tujuan yang hendak dicapai oleh penelitian terhadap masalah yang sedang dikaji.³² Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini tentu tidak akan menyimpang dari apa yang menjadi permasalahannya. Sebab tujuan juga berarti jawaban yang hendak dicapai dalam sub-sub rumusan masalah. Sehingga tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep KUHP tentang kejahatan pembunuhan anak di bawah umur oleh orang tuanya.
2. Untuk mengetahui konsep Hukum Pidana Islam terhadap kejahatan pembunuhan anak di bawah umur oleh orang tuanya.
3. Untuk mengetahui analisis komparatif antara KUHP dan Hukum pidana Islam tentang kejahatan pembunuhan anak di bawah umur terhadap orang tuanya.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

³²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian* (Makassar: Alauddin Press, 2013), h. 17.

1. Kegunaan Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya KUHP dan hukum pidana Islam. Di samping itu pula dapat menjadi acuan atau perbandingan bagi para peneliti yang ingin mengadakan atau mengembangkan penelitian sejenis.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan tambahan sumber informasi atau rujukan terhadap pengetahuan masyarakat tentang perlindungan hukum yang menimpa anak, dalam hal ini anak yang menjadi korban tindak pidana serta pemahaman pada masyarakat, bangsa dan negara bahwa ada sanksi yang berat yang mesti dijatuhkan bagi para pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana pembunuhan bagi anak. Selain itu kegunaan bagi para aparat hukum dalam hal ini adalah hakim dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban pembunuhan yang tidak lain adalah untuk menjamin hak-haknya, seperti hak untuk meneruskan kelangsungan hidupnya. Sebab anak juga merupakan manusia yang mesti dihargai hidupnya seperti orang tua.

BAB II

KONSEP KEJAHATAN PEMBUNUHAN ANAK DI BAWAH UMUR OLEH ORANG TUANYA MENURUT KUHP

A. Tindak Pidana Pembunuhan Menurut KUHP

Tindak pidana pembunuhan; tindak pidana menurut hukum pidana nasional terdiri dari dua kata, yaitu kata “tindak” dan kata “pidana”. Kata “tindak” berasal dari bahasa Jawa yang berarti perbuatan, tingkah laku, dan kelakuan, sedangkan kata “pidana” artinya kejahatan, kriminal dan pelanggaran.¹ Istilah tindak pidana sendiri merupakan hasil terjemahan dari kata *Strafbaar Feit* yang berasal dari bahasa Belanda yang merupakan istilah yang dipakai dalam *Wetboek van Srtafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ada banyak pendapat mengenai pengertian dari tindak pidana atau *Strafbaar feit* ini, di antaranya adalah:

1. Hazewinkel-Suringa telah membuat teori yang menyatakan bahwa rumusan umum dari “*Strafbaar feir*” adalah suatu perilaku manusia yang pada suatu saat terttentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.²
2. Prof. Simmons merumuskan “*Strafbaarfeir*” adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja

¹W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Cet. V; Jakarta: Balai Pustaka, 1982), h. 174.

²P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), h. 181.

oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.³

3. Prof. Moeljatno mengatakan bahwa “Perbuatan Pidana” adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴

Pada hakikatnya, tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu kejahatan dan pelanggaran. Pembagian ini ada di dalam KUHP Belanda pada tahun 1886 yang kemudian tetap ada pada KUHP Indonesia pada tahun 1918. Dasar perbedaan ini, menurut para sarjana di karenakan sejak semula dapat dirasakan mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum sebelum para pembuat undang-undang menyatakannya di dalam undang-undang atau disebut dengan delik hukum dan mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum setelah dinyatakan di dalam undang-undang atau disebut juga dengan delik undang-undang. Perbedaan lainnya adalah pada berat atau ringannya pidana yang diancamkan. Dalam tindak kejahatan, diancamkan pidana yang berat seperti “pidana mati”, sedangkan untuk tindak pelanggaran maka diancam dengan sanksi yang ringan. Namun, dalam perkembangannya telah terjadi kesulitan dalam pembedaannya antara kejahatan dan pelanggaran, karena baik kejahatan maupun pelanggaran dapat diancam dengan pidana penjara atau denda.⁵ Dalam karya ilmiah ini, lebih digunakan istilah kejahatan dibandingkan dengan istilah pelanggaran.

³P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, h. 181.

⁴Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 54.

⁵S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Alumni Ahaem Petehaem, 1996), h. 226.

Dalam istilah KUHP, pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian kegiatan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* (unsur kesengajaan) dari pelakunya itu harus ditujukan pada “akibat” berupa meninggalnya orang lain tersebut.⁶

Menurut Adami Chazawi kejahatan terhadap nyawa (*misdriften tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.⁷ Pembunuhan sendiri berasal dari kata *bunuh* yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh adalah membuat supaya mati. Jadi pembunuhan adalah orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Suatu perbuatan yang dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.⁸ Sedangkan pengertian pembunuhan menurut Zainuddin Ali adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan/atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan/atau beberapa orang meninggal dunia.⁹

Dari pengertian tersebut, dapat diambil satu kesimpulan terkait dengan definisi pembunuhan, bahwa pembunuhan merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menghilangkan nyawa orang lain, baik disengaja maupun tidak

⁶P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus: kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan serta kejahatan yang membahayakan bagi nyawa, tubuh dan kesehatan* (Bandung: Bina Cipta, 1986), h. 1.

⁷Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa* (Cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 55.

⁸Hilman Hadi Kusuma, *Bahasa Hukum Indonesia* (Bandung: Alumni, 1992), h. 129.

⁹Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 24.

sengaja. Selanjutnya mengenai anak. Yang dimaksud anak di sini adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih memadai.¹⁰

Seorang anak juga harus mendapatkan perlindungan dari orang tuanya. Seperti dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyatakan bahwa “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Yang dimaksud orang tua dalam pasal ini adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.¹¹ Dari sini dapat diketahui bahwa orang tua memiliki peranan penting dalam mengasuh anak, sehingga segala hal yang terjadi pada anak harus dikembalikan kepada orang tuanya.

Di dalam KUHP, seseorang tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pidananya ketika belum berumur 16 tahun, seperti yang terdapat pada pasal 45 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Pengertian anak terdapat pada pasal 1 nomor 2: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21

¹⁰Mohammad Taufik Makaro, Letkol Sus, Weny Bukamo, Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 1.

¹¹Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (Bandung : Citra Umbara, 2012), h. 78.

tahun dan belum pernah kawin”.¹² Karena anak berasal dari sebuah keluarga, yakni keluarga yang dimaksud adalah lembaga terkecil di dalam masyarakat, maka dari sanalah seorang anak mendapatkan pendidikan untuk pertama kalinya.

Dalam hal ini pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu.¹³

Pada intinya, keluarga berasal dari adanya suami dan istri yang akhirnya memegang peranan sebagai orang tua. Kalau dikatakan di awal bahwa keluarga sebagai lembaga di mana seorang anak mendapatkan pendidikan untuk pertama kalinya maka orang tua adalah pihak yang paling utama dan bertanggungjawab dalam mengemban tugas tersebut. Hubungan antara orangtua dan anak pada dasarnya adalah hubungan yang tidak akan pernah putus. Ini merupakan hubungan seumur hidup. Oleh karena itu, kedua pihak di dalam hubungan ini yaitu orang tua dan anak dapat menjaga dan saling menghormati keberadaan masing-masing.¹⁴

Banyak sekali peraturan yang mengatur tentang kepentingan anak selain dari keberadaan KUHP dari segi pidana dan KUH Perdata. Seperti misalnya Undang-

¹²Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000), h. 1.

¹³Chairul Huda, *Dari Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan': Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2011), h. 70-71.

¹⁴Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1991), h. 51.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah berawal dari di mana anak dibahas dalam Bab IX pasal 42-47 kemudian lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang usaha kesejahteraan anak dan terakhir adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.¹⁵

Undang-Undang banyak membahas tentang kepentingan anak, akan tetapi persoalan anak tidak terlepas dari pengasuh utamanya yakni orang tua. Dari segi banyaknya aturan yang membahas tentang anak dan hal-hal yang melingkupinya, di beberapa Undang-Undang juga telah dirumuskan terkait kepentingan orang tua.

Orang tua adalah pihak yang paling diwajibkan dalam menjaga dan memelihara tumbuh kembangnya anak di dalam menjalani kehidupan. Kewajiban ini juga diatur dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang pada dasarnya, kewajiban orang tua adalah sebagai berikut:

1. Mengasahi, memelihara, mendidik dan melindungi anak.
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuannya, bakat dan minatnya dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak atau perkawinan dini.¹⁶

Kesejahteraan dan perlindungan anak bukan masalah milik orang tua saja tetapi juga milik semua elemen di dalam masyarakat. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak juga dijelaskan bahwa ada kewajiban yang dibebankan kepada seluruh warga negara dan pemerintah, yaitu sebagai berikut:

¹⁵Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, h. 67.

¹⁶Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, h. 23.

1. Bertanggungjawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak.
2. Berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
3. Menjamin perlindungan pemeliharaan dan kesejahteraan anak.
4. Menjamin penyelenggaraan perlindungan anak.
5. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat.¹⁷

Serta di dalam pembunuhan anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 18 ayat 3 menyatakan bahwa “pembunuhan terhadap anak itu adalah hilangnya nyawa anak yang sebelumnya disertai dengan kekerasan, kekejaman atau penganiayaan”.¹⁸

Untuk itu dari beberapa pendapat tersebut dapat dipahami bahwa tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya menurut KUHP adalah suatu perbuatan yang bertentangan atau perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan hilangnya nyawa seorang anak atau orang lain dan diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

B. Bentuk-Bentuk Pembunuhan

Pembunuhan disebut juga sebagai kejahatan terhadap nyawa. Ada berbagai istilah dalam menjelaskan terkait masalah pembunuhan itu. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kejahatan terhadap nyawa ini dibagi ke dalam dua bagian yaitu atas dasar kesalahannya dan atas dasar objeknya (nyawa). Atas dasar kesalahannya dapat dibagi menjadi :

¹⁷Prinst Darwan, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), h. 156.

¹⁸Prinst Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, h. 19.

1. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*).
Pembunuhan dalam bentuk sengaja ini dapat dibagi lagi menjadi tujuh jenis, yaitu:
 - a. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (pasal 338) dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Unsur-unsurnya terdiri dari:
 - 1) Unsur objektif : perbuatannya adalah menghilangkan nyawa dan objeknya adalah nyawa orang lain
 - 2) Unsur subjektif : dengan sengaja
 - b. Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain (pasal 339) dengan ancaman penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun. Unsur-unsur yang terdapat pada pembunuhan jenis ini adalah :
 - 1) Semua yang ada pada pembunuhan biasa dalam bentuk pokok.
 - 2) Yang diikuti, disertai, atau diikuti oleh tindak pidana lain.
 - 3) Pembunuhan yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan, mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain dan jika bertujuan untuk menghindarkan diri sendiri ataupun orang lain yang ikut terlibat atau untuk memastikan penguasaan benda yang didapatnya dengan cara melawan hukum.
 - c. Pembunuhan Berencana (pasal 340) diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun. Unsur-unsurnya adalah:
 - 1) Unsur objektif : perbuatannya adalah menghilangkan nyawa dan objeknya adalah nyawa orang lain.
 - 2) Unsur subjektif : dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu.
 - d. Pembunuhan bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan oleh ibunya.
Pembunuhan jenis ini dapat dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu pembunuhan

bayi biasa atau yang tidak direncanakan dan pembunuhan bayi yang direncanakan. Pada dasarnya, unsur-unsur yang terdapat pada kedua macam pembunuhan bayi tersebut adalah sama dengan pelaku adalah ibunya, objeknya adalah nyawa bayi, motifnya adalah karena takut ketahuan dan dilakukan dengan sengaja. Hal yang membedakannya adalah pada pembunuhan bayi dengan berencana maka adanya suatu keputusan yang telah diambil sebelumnya yaitu membunuh bayi itu.

- e. Pembunuhan atas permintaan korban (pasal 334) diancam dengan pidana penjara 12 tahun. Unsur-unsurnya adalah:
 - 1) Perbuatannya adalah menghilangkan nyawa
 - 2) Objeknya adalah nyawa orang lain
 - 3) Atas permintaan dari korban itu sendiri
 - 4) Yang jelas dinyatakan dengan sungguh-sungguh
- f. Pembunuhan berupa pengancuran atau pertolongan pada bunuh diri (Pasal 345), diancam dengan pidana penjara 4 tahun kalau orang tersebut jadi bunuh diri. Unsur-unsurnya adalah:
 - 1) Unsur objektif : perbuatannya adalah mendorong, menolong atau memberikan sarana kepada orang untuk bunuh diri dan orang tersebut jadi bunuh diri.
 - 2) Unsur subjektif : dengan sengaja.
- g. Pembunuhan kandungan atau pengguguran (pasal 346-349). Dilihat dari subjek hukumnya maka pembunuhan jenis ini dapat dibedakan menjadi:
 - 1) Yang dilakukan sendiri (pasal 346) diancam penjara 4 tahun
 - 2) Yang dilakukan oleh orang lain atas persetujuannya (pasal 347)

- 3) Yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas tertentu seperti dokter, bidan dan juru obat baik atas persetujuannya ataupun tidak.
2. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan tidak sengaja (*culpose misdriyven*) terdapat pada pasal 359 dengan unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Adanya unsur kelalaian atau culpa dalam bentuk kurang hati-hatian.
 - b. Adanya wujud perbuatan tertentu.
 - c. Adanya kematian orang lain.
 - d. Adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dan akibat kematian orang lain.¹⁹

Sedangkan atas dasar objeknya, dapat dibedakan menjadi tiga yaitu:

1. Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat pada pasal 338-340 dan pasal 344-345.
2. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat pada pasal 341-343.
3. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada di dalam kandungan ibu atau janin, dimuat pada pasal 346-349.

Setelah membagi beberapa macam bentuk kejahatan terhadap nyawa maka dapat disimpulkan bahwa ada berbagai macam bentuk pembunuhan dan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan kasus pembunuhan ini, sebelum diputuskan harus dilihat terlebih dahulu atas dasar apa pelaku melakukan kejahatan tersebut. KUHP merumuskan banyak hal mengenai bentuk-bentuk kejahatan terhadap nyawa ini tidak lain karena kejahatan terhadap nyawa adalah hal penting karena menyangkut nyawa manusia.

¹⁹Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, h. 56.

C. Sanksi dalam Kejahatan Pembunuhan

Agar kejahatan dapat menimbulkan efek jera kepada para pelakunya, maka dibutuhkan adanya sanksi sebagai bentuk mewujudkan tujuan hukum di dalam masyarakat. Masalah penetapan sanksi dalam hukum pidana, apapun jenis dan bentuk sanksinya harus didasarkan dan diorientasikan pada tujuan pemidanaan. Setelah tujuan pemidanaan ditetapkan, barulah jenis dan bentuk sanksi apa yang paling tepat bagi pelaku kejahatan ditentukan.²⁰

Berikut dijelaskan beberapa sanksi dalam kejahatan pembunuhan yang terdapat di dalam KUHP.

1. Pembunuhan sengaja, dalam bentuk umum atau pokok diatur dalam pasal 338

KUHP:

“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

2. Pembunuhan berencana, diatur dalam pasal 340 KUHP:

“Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

3. Pembunuhan tidak dengan sengaja. Diatur dalam pasal 359 KUHP:

“Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.”

Dalam KUHP, tindak pidana pembunuhan juga merupakan suatu bentuk kejahatan yang serius dan penting. Hal ini dapat dilihat dari ancaman hukuman dari ketiga bentuk tindak pidana tersebut.

Pembunuhan sengaja merupakan bentuk umum, pokok atau biasa dari suatu tindak pidana pembunuhan sedangkan pembunuhan berencana, sangat terkait dengan

²⁰Sholihuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana* (Cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 120-121.

batin dari si pelaku. Pada dasarnya, istilah direncanakan terlebih dahulu adalah suatu pengertian yang harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Pengambilan keputusan untuk berbuat atas sesuatu dilakukan pada suasana hati yang tenang.
- b. Dari sejak adanya keputusan atau kehendak akan berbuat sesuatu sampai pada pelaksanaan ada tenggang waktu yang cukup yang dapat dipergunakan untuk berpikir kembali.
- c. Dalam melaksanakan perbuatannya, dilakukan dalam suasana hati yang tenang. Artinya ketika melakukan perbuatan dalam kondisi yang tidak dipengaruhi oleh emosi dan tidak tergesa-gesa.²¹

Pada pembunuhan berencana ini, ancaman hukumannya lebih berat karena kembali pada niat dan kesiapan pelaku dalam melakukan tindakan pembunuhannya. Tenggang waktu yang ada merupakan suatu kesempatan bagi pelaku untuk meneruskan atau tidak dan ketika pelaku memilih untuk tetap melanjutkan perbuatannya maka ancaman hukumannya pun akan lebih berat, sedangkan pada pembunuhan tidak disengaja, terdapat unsur-unsur sebagai berikut: adanya kelalaian, adanya wujud perbuatan tertentu, yang kemudian mengakibatkan kematian orang lain dan adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan kematian orang lain tersebut. Hal yang paling membedakan antara pembunuhan tidak sengaja dengan dua pembunuhan lainnya adalah tidak adanya niat dari si pelaku untuk mengakibatkan matinya atau hilangnya nyawa seseorang dan juga adanya unsur kelalaian sehingga mengakibatkan ancaman hukumannya pun jauh lebih ringan daripada dua bentuk pembunuhan lainnya.

²¹Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, h. 27.

BAB III

KONSEP KEJAHATAN PEMBUNUHAN ANAK DI BAWAH UMUR OLEH ORANG TUANYA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. *Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam*

Pembunuhan merupakan dosa besar karena akibat yang ditimbulkan dapat menghilangkan nyawa seseorang. Di dalam sejarah kehidupan manusia, pembunuhan pertama dilakukan oleh Qabil terhadap Habil. Keduanya merupakan anak dari Nabi Adam a.s. Peristiwa ini dijelaskan oleh Allah swt. dalam al-Quran. Seperti dalam potongan QS al-M 'idah/5: 30-31.

فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٣٠﴾
فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُورِي سَوْءَةَ أَخِيهِ ﴿٣١﴾ قَالَ
يَوَيْلَتِي أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوْرِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ
مِنَ النَّادِمِينَ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

“(30). Maka nafsu (Qabil) mendorongnya untuk membunuh saudaranya, kemudian dia pun (benar-benar) membunuhnya; maka jadilah dia termasuk orang yang rugi. (31). Kemudian Allah Mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya (Qabil) bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, “Oh, celaka aku! Mengapa Aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?” Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.”¹

Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir *Al-Mishbah*, nasehat-nasehat yang disampaikan oleh Habil kepada saudaranya sama sekali tidak berbekas di hati dan pikiran Qabil. Ia telah dikuasai oleh hawa nafsu amarahnya, maka setelah beberapa

¹Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Surabaya: UD. Halim, 2010), h. 112.

saat ia ragu dan berpikir, *hawa nafsunya menjadikan ia rela* sedikit demi sedikit dan mempermudah hati dan pikirannya untuk membunuh saudara kandungnya itu. Setelah ia membunuh saudaranya, ia tidak mengetahui apa yang harus dilakukannya, karena ini adalah pembunuhan pertama yang terjadi di kalangan manusia.²

Allah swt. melarang tindakan pembunuhan dan ini terlihat dalam beberapa firman Allah seperti pada QS al-An' m/6: 151.

... وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ... ﴿١٥١﴾

Terjemahnya:

“...Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar....”³

Menurut Quraish Shihab, motivasi pembunuhan yang dibicarakan oleh ayat al-An' m ini, adalah kemiskinan yang sedang dialami oleh ayah dan kekhawatirannya akan semakin terpuruk dalam kesulitan hidup akibat lahirnya anak. Karena itu di sini Allah segera memberi jaminan kepada sang ayah dengan menyatakan bahwa : *Kami akan memberi rezeki kepada kamu*, baru kemudian dilanjutkan dengan jaminan ketersediaan rezeki untuk anak yang dilahirkan, yakni melalui lanjutan ayat itu *dan kepada mereka* yakni anak-anak mereka.⁴

Sebagai tindakan pertama yang dilakukan pertama kali antar umat manusia, Allah menetapkan hukuman yang sangat tegas, seperti yang dijelaskan dalam QS al-M 'idah/5: 45.

²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishb h: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol. III* (Cet. I; Jakarta: Lentera hati, 2001), h. 72-73.

³Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 148.

⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishb h: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol. IV* (Cet. I; Jakarta: Lentera hati, 2001), h. 333.

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ... ﴿٥٠﴾

Terjemahnya :

“Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada *qishas*-nya (balasan yang sama)....”⁵

Kata () *qish sh* terambil dari kata *qashsha*, yang pada mulanya berarti “mengikuti jejak”. Seorang yang melakukan satu kejahatan, maka ia dibalas serupa dengan kejahatan yang dilakukannya, seakan-akan yang membalas mengikuti jejak pelaku kejahatan itu. Ayat ini hanya berbicara tentang tindak kriminal yang disengaja, tidak yang berbentuk keliru/tidak disengaja. Ini karena konteks kecaman terhadap Bani Israil adalah konteks perbuatan kriminal yang disengaja.⁶

Dari ayat tersebut, selain Allah menetapkan secara tegas bagaimana hukuman dalam tindak pidana, juga secara tidak langsung menjelaskan bahwa hukuman yang setimpal dalam tindak pidana pembunuhan tidak hanya terdapat di dalam al-Qur'an tetapi terdapat juga di dalam kitab suci lainnya. Hal ini juga menyiratkan bahwa hukuman yang ditetapkan dalam tindak pidana ini yaitu *qish sh* dianggap paling adil untuk menghargai jiwa manusia yang sudah diambil atau dihilangkan nyawanya oleh orang lain. Dalam hal ini, hukum pidana Islam sangat mementingkan hadirnya sanksi yang dapat membuat pelaku tindak pidana menjadi jera. Oleh karena pemberian sanksi hukuman *qish sh* sudah tepat dalam menjamin kehidupan manusia-manusia lainnya.

⁵Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 115

⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishb h: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol. III* (Cet. I; Jakarta: Lentera hati, 2001), h. 101.

Sedangkan mengenai pengertian pembunuhan itu sendiri, dalam bahasa arab, pembunuhan disebut قتل dari kata “ قتل ” yang bersinonim قتل yang artinya mematikan.⁷

Abdul Qadir Al-Audah mengartikannya sebagai perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain.⁸

B. Bentuk-Bentuk Pembunuhan

Pembunuhan secara garis besar dapat dibagi kepada dua bagian sebagai berikut:

1. Pembunuhan yang dilarang, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan melawan hukum.
2. Pembunuhan dengan hak, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan tidak melawan hukum, seperti membunuh orang murtad, atau pembunuhan oleh seorang algojo yang diberi tugas melakukan hukuman mati.⁹

Pembunuhan yang dilarang dapat dibagi kepada beberapa bagian. Dalam hal ini terdapat beberapa perbedaan pendapat dari para ulama sebagai berikut:

1. Ulama fiqh atau jumhur fuqaha membedakan jarimah pembunuhan menjadi tiga kategori, yaitu:
 - a. Pembunuhan sengaja
 - b. Pembunuhan menyerupai sengaja
 - c. Pembunuhan tersalah

⁷Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 136.

⁸Abdul Qadir Al-Audah, *At-Tasyr ' Al-Jina y Al-Isl m y* (Beirut: D r Al-kit b Al-ar bi, t.th), h. 6.

⁹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 139.

2. Imam Malik membedakan jarimah pembunuhan menjadi dua kategori, yaitu:

- a. Pembunuhan sengaja, dan
- b. Pembunuhan tersalah

Ketiga macam pembunuhan di atas disepakati oleh jumhur ulama, kecuali Imam Malik. Menurut pendapat Imam Malik bahwa dalam al-Quran hanya ada jenis pembunuhan sengaja dan tersalah, sedangkan pembunuhan menyerupai sengaja tidak disebutkan.¹⁰

1. Pembunuhan Sengaja (*Qatl 'Amd*)

Pembunuhan sengaja adalah perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa dengan disertai niat membunuh korban.¹¹ Artinya pembunuhan sengaja merupakan suatu pembunuhan di mana pelaku perbuatan tersebut sengaja melakukan suatu perbuatan dan dia menghendaki akibat dari perbuatannya, yaitu matinya orang yang menjadi korban. Sebagai indikator dari kesengajaan untuk membunuh tersebut dapat dilihat dari alat yang digunakannya. Dalam hal ini alat yang digunakan untuk membunuh adalah alat yang pada umumnya dapat mematikan korban, seperti senjata api, senjata tajam dan sebagainya. Sedangkan menurut Hasbullah Bakri pembunuhan sengaja adalah suatu perbuatan yang disertai niat (direncanakan) sebelumnya untuk menghilangkan nyawa orang lain. Dengan menggunakan alat-alat yang dapat mematikan, seperti golok, kayu runcing, besi pemukul dan sebagainya, dengan sebab-sebab yang tidak dibenarkan oleh ketentuan hukum.¹²

¹⁰Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 5-6.

¹¹Abdul Qadir Al-Audah, *At-Tasyr ' Al-Jinaiy Al-Islam* y, h. 7.

¹²Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), h. 118.

2. Pembunuhan Menyerupai Sengaja (*Qatlul Shibhul 'Amd*)

Pengertian dari pembunuhan menyerupai sengaja ini memiliki perbedaan dari para ulama, yaitu:

- a. Menurut Hanafiyah pembunuhan menyerupai sengaja adalah sengaja memukul dengan menggunakan tongkat, cambuk, batu, tangan, atau benda lainnya yang mengakibatkan kematian.¹³
- b. Menurut Syafi'iyah pembunuhan menyerupai sengaja yaitu sengaja dalam melakukan perbuatan, tetapi keliru dalam pembunuhan. Maksudnya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak diniatkan untuk membunuh tetapi menyebabkan kematian.¹⁴
- c. Menurut Hanabilah pembunuhan menyerupai sengaja adalah melakukan perbuatan yang dilarang dengan alat yang pada umumnya tidak akan mematikan namun kenyatannya korban mati karenanya.¹⁵

Dari definisi tersebut, dapat diambil inti sari bahwa dalam pembunuhan menyerupai sengaja, perbuatan memang dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak ada unsur atau niat dalam diri pelaku untuk membunuh korban. Sebagai bukti dapat dilihat dari alat yang digunakan. Apabila alat tersebut pada umumnya tidak akan mematikan seperti tongkat, ranting kayu, batu kerikil, atau sapu lidi maka pembunuhan termasuk pembunuhan menyerupai sengaja, akan tetapi jika alat yang digunakan untuk membunuh pada umumnya mematikan, seperti senjata api, senjata tajam, atau racun, maka pembunuhan tersebut termasuk pembunuhan sengaja.¹⁶

¹³ Abdul Qadir Al-Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, h. 93.

¹⁴ Abdul Qadir Al-Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, h. 94.

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 142.

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 142.

3. Pembunuhan Tersalah (*Qatl al-Khatt '*)

Pembunuhan tersalah adalah pembunuhan yang tidak disertai niat atau maksud untuk membunuh atau menganiaya.¹⁷ Pembunuhan tersalah dibagi menjadi dua kategori yaitu pembunuhan karena kekeliruan semata-mata dan pembunuhan yang disamakan dengan kekeliruan. Pembunuhan karena kekeliruan semata-mata adalah suatu pembunuhan di mana pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak ada maksud untuk mengenai orang melainkan terjadi kekeliruan, baik dalam perbuatannya maupun dalam dugaannya.

Sedangkan pembunuhan yang disamakan dengan kekeliruan adalah suatu pembunuhan di mana pelaku tidak mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan dan tidak menghendaki akibatnya.¹⁸

Pembunuhan tersalah ini memiliki tiga kemungkinan bisa terjadi, yaitu:

- a. Bila si pelaku pembunuhan sengaja melakukan suatu perbuatan dengan tanpa maksud melakukan suatu kejahatan, tetapi mengakibatkan kematian seseorang; kesalahan seperti ini disebut salah dalam perbuatan (*error in concrito*).
- b. Bila si pelaku pembunuhan sengaja melakukan perbuatan dan mempunyai niat membunuh seseorang yang dalam persangkaannya boleh dibunuh namun kenyatannya orang tersebut tidak boleh dibunuh. Kesalahan seperti ini disebut salah dalam maksud (*error in objecto*).
- c. Bila pelaku tidak bermaksud melakukan kejahatan tetapi akibat kelalaiannya dapat menimbulkan kematian seseorang.¹⁹

¹⁷Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 17.

¹⁸Abdul Qadir Al-Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, h. 104.

¹⁹A. Jazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 123-124.

C. *Unsur-Unsur Pembunuhan*

1. Unsur-Unsur Pembunuhan Sengaja

a. Korban yang dibunuh adalah manusia hidup

Salah satu unsur dari pembunuhan disengaja adalah korban harus berupa manusia yang hidup. Dengan demikian apabila korban bukan manusia atau manusia tetapi ia sudah meninggal lebih dahulu maka pelaku bisa dibebaskan dari hukuman *qish sh* atau dari hukuman-hukuman yang lain, akan tetapi jika korban dibunuh dalam keadaan sekarat maka pelaku dapat dikenakan hukuman. Karena orang yang sedang sekarat termasuk orang yang masih hidup. Kalau korban itu merupakan janin yang masih dalam kandungan maka ia belum dianggap manusia yang hidup mandiri, sehingga kasus ini dikelompokkan ke dalam jarimah tersendiri.²⁰

b. Kematian adalah hasil dari perbuatan pelaku

Antara perbuatan dan kematian terdapat hubungan sebab akibat, yaitu bahwa kematian yang terjadi merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Apabila hubungan tersebut terputus artinya kematian disebabkan oleh hal lain, maka pelaku tidak dianggap sebagai pembunuh sengaja.²¹ Dalam hal ini tidak ada keharusan bahwa pembunuhan tersebut harus dilakukan dengan cara-cara tertentu, namun demikian, para ulama mengaitkan pelakunya dengan alat yang dipakai ketika melakukan pembunuhan haruslah yang lazim dapat menimbulkan kematian. Kalau alat yang dipakai keluar dari kelaziman (tidak umum) sebagai alat pembunuhan, hal itu akan mengundang syubhat, sedangkan

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 140.

²¹ Abdul Qadir Al-Audah, *At-Tasyr ' Al-Jinaiy Al-Islam y*, h. 27.

syubhat harus dihindari.²² Akan tetapi menurut Imam Malik, setiap alat dan cara apa saja yang mengakibatkan kematian, dianggap sebagai pembunuhan sengaja apabila perbuatannya dilakukan dengan sengaja.²³

c. Pelaku tersebut menghendaki terjadinya kematian

Pembunuhan dianggap sebagai pembunuhan sengaja apabila dalam diri pelaku terdapat niat untuk membunuh korban, bukan hanya kesengajaan dalam perbuatannya saja. Niat untuk membunuh korban inilah yang membedakan antara pembunuhan sengaja dengan pembunuhan menyerupai sengaja. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur fuqaha yang terdiri atas Imam Abu Hanifah, Imam Syafii, dan Imam Ahmad ibn Hanbal. Akan tetapi menurut Imam Malik, niat membunuh itu tidak penting, dalam pembunuhan sengaja yang penting adalah apakah perbuatannya itu sengaja atau tidak, apabila pelaku sengaja melakukan pemukulan misalnya, meskipun tidak ada maksud untuk membunuh korban maka perbuatannya itu sudah termasuk pembunuhan sengaja.²⁴

2. Unsur-Unsur Pembunuhan Menyerupai Sengaja

a. Perbuatan pelaku mengakibatkan kematian korban

Untuk terpenuhinya unsur ini, pelaku disyaratkan melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian korban, apa pun bentuk perbuatannya, baik pemukulan, pelukaan, maupun lainnya dari beragam bentuk penganiayaan dan menyakiti yang tidak termasuk pemukulan dan pelukaan, seperti menenggelamkan, membakar, meracuni dengan tanpa niat membunuh. Di samping itu juga disyaratkan, korban

²²Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, h. 119.

²³Abdul Qadir Al-Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, h. 27.

²⁴Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 141.

yang dibunuh adalah orang yang terpelihara darahnya atau yang terjamin keselamatannya oleh negara Islam.²⁵

b. Adanya kesengajaan pelaku dalam melakukan perbuatan

Pelaku disyaratkan melakukan perbuatan secara sengaja yang mengakibatkan kematian tanpa niat membunuh korban secara sengaja. Ini adalah satu-satunya perbedaan antara pembunuhan sengaja dan pembunuhan menyerupai sengaja. Dalam pembunuhan sengaja pelaku melakukan perbuatan secara sengaja dan niat untuk membunuh korban. Adapun dalam pembunuhan menyerupai sengaja pelaku melakukan perbuatan secara sengaja, tetapi tidak berniat membunuh korban.²⁶

c. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban.²⁷

Disyaratkan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan penganiayaan, yaitu penganiayaan itu menyebabkan kematian korban secara langsung atau merupakan sebab yang membawa kematiannya. Jadi tidak dibedakan antara kematian korban itu seketika dengan kematian yang terjadi tidak seketika.²⁸

3. Unsur-Unsur Pembunuhan Tersalah

a. Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian korban

Untuk terwujudnya tindak pidana pembunuhan karena kesalahan, disyaratkan adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, baik ia menghendaki perbuatan tersebut maupun tidak. Perbuatan tersebut tidak disyaratkan harus perbuatan tertentu seperti pelukaan, melainkan perbuatan apa

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 142.

²⁶ Abdul Qadir Al-Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, h. 100.

²⁷ A. Jazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, h. 132.

²⁸ A. Jazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, h. 133.

saja yang mengakibatkan kematian, seperti membuang air panas, melemparkan batu dan sebagainya. Di samping itu, perbuatan tersebut bisa langsung bisa juga tidak langsung. Contoh perbuatan langsung seperti menembak kijang tetapi pelurunya menyimpang mengenai orang, contoh perbuatan yang tidak langsung seperti seorang yang menggali saluran air di tengah jalan dan tidak diberi rambu-rambu, sehingga mobil yang lewat pada malam hari terjungkal dan penumpangnya ada yang mati.

b. Perbuatan terjadi karena kekeliruan pelaku

Kekeliruan merupakan unsur yang berlaku untuk semua jarimah. Unsur kekeliruan ini terdapat apabila dari suatu perbuatan timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh pelaku. Baik perbuatannya itu langsung maupun tidak langsung, dikendaki oleh pelaku atau tidak. Dengan demikian, dalam pembunuhan karena kesalahan, kematian terjadi akibat kelalaian pelaku atau kurang hati-hatinya, atau karena perbuatannya itu melanggar peraturan pemerintah. Ukuran kekeliruan dalam syariat Islam adalah tidak adanya kehati-hatian, dengan demikian semua bentuk ketidakhati-hatian dan tindakan melampaui batas serta istilah lain sama, semua itu termasuk dalam kekeliruan.²⁹

c. Antara kekeliruan dan akibat perbuatan mempunyai hubungan sebab akibat

Untuk adanya pertanggungjawaban bagi pelaku dalam pembunuhan karena kekeliruan disyaratkan bahwa kematian merupakan akibat dari kekeliruan tersebut. Artinya kekeliruan merupakan penyebab bagi kematian tersebut. Dengan demikian antara kekeliruan dan kematian terdapat hubungan kausalitas atau sebab akibat.

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 146.

Apabila hubungan tersebut terputus maka tidak ada pertanggungjawaban bagi pelaku. Hubungan sebab akibat dianggap ada, manakala pelaku menjadi penyebab dari perbuatan yang mengakibatkan kematian tersebut. Baik kematian itu sebagai akibat langsung perbuatan pelaku maupun akibat langsung perbuatan pihak lain. Contohnya orang yang memberi upah orang lain untuk membuat saluran di tengah jalan, lalu ada orang jatuh ke dalamnya dan mati. Dengan begitu orang yang menyuruh orang membuat saluran itu adalah orang yang bertanggungjawab.³⁰ Sehingga dapat disimpulkan bahwa tak ada akibat yang terjadi dan menimbulkan kematian jika tak ada sebab (pelaku) yang melakukan hal itu terjadi.

D. Sanksi Pembunuhan

Sanksi dari tindak pidana pembunuhan di dalam hukum pidana Islam secara garis besar adalah hukuman itu sendiri dari hukuman pokok, serta ada juga hukuman pengganti dan hukuman tambahan. Namun hukuman pokok dalam tindak pidana pembunuhan adalah *qish sh*. Di mana *qish sh* adalah balasan setimpa yang diberikan kepada pelaku tindak pidana, yang apabila dimaafkan oleh keluarga korban, maka hukuman penggantinya adalah diyat. Dan hukuman tambahannya yaitu terhalangnya warisan atau wasiat. Dan di dalam hukuman ini ancaman hukumannya bertujuan untuk memberikan pengajaran dan yang berwenang menetapkan dan menjatuhkan hukuman adalah para penguasa dan hukuman tambahan. Hukuman tambahan yang dimaksud adalah seperti pencabutan hak waris.³¹ Sedangkan di dalam salah satu syarat wajib *qish sh* sendiri menyatakan bahwa:

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 147

³¹ Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam II* (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, t.th), h. 259.

لَا يَقَادُ الْآبُ مِنْ ابْنِهِ³² ۝

Artinya:

“Ayah tidak dihukum dengan sebab membunuh anaknya.” (HR. Baihaqi).

لَا يَقْتُلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ³³ ۝

Artinya:

“Orang tua tidak *diqish sh* dengan sebab (membunuh) anaknya. (HR Ibnu Majah No.2661 dan Dinilai Shahih oleh Al-Albani dalam Irwa’ Al-Ghalil No. 2214).”³⁴

Namun, dengan adanya perbedaan tersebut lantas sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan menjadi hilang. Ada beberapa hukuman yang tetap menjadi tanggungan pelaku atas korban yang disesuaikan dari jenis pembunuhan yang dilakukan. Hukuman yang dijatuhkan untuk masing-masing jenis pembunuhan yang berbeda-beda itu, di antaranya:

1. Hukuman pembunuhan sengaja (*qatl ‘amdi*) sanksinya hukum *qish sh* yaitu

menjatuhkan hukuman yang setimpal. Dan di dalam QS al-Baqarah/2: 178.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ
ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qish sh* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka,

³²Ali bin ‘Umar bin Ahmad bin Mahdi al-Darqutni, *Sunan al-Darqutni*, Juz 4 (Bairut: Muassasah al-Risalah, 2004), h. 167.

³³Muhammad bin Yazid al-Quzwaini, *Sunan Ibn Majah*, Juz 3 (t.tp.: Muassasah al-Risalah al-‘Alamiah, 2009), h. 674.

³⁴Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), h. 431.

hamba sahaya dengan hamba sahaya, wanita dengan wanita. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Allah Barangsiapa melampaui batas sesudah itu, maka dia akan mendapatkan adzab yang sangat pedih.”³⁵

Menurut Quraish Shihab dalam tafsir *Al-Mishbah*, diwajibkan atas kamu *qish sh*. Ini diwajibkan kalau kamu – wahai keluarga terbunuh – menghendaki sebagai sanksi akibat pembunuhan tidak sah atas keluarga kalian. Tetapi pembalasan itu harus melalui yang berwenang dengan ketentuan bahwa, *orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita*. Jangan menuntut – seperti adat Jahiliyah – membunuh orang merdeka walau yang terbunuh adalah hamba sahaya, jangan juga menuntut balas terhadap dua atau banyak orang kalau yang terbunuh secara tidak sah hanya seorang, karena makna () *qish sh* adalah persamaan. Boleh menuntut bunuh lelaki walau ia membunuh wanita, demikian juga sebaliknya, karena itulah keadilan dan persamaan dalam mencabut nyawa seorang manusia. Tetapi kalau keluarga teraniaya ingin memaafkan dengan menggugurkan sanksi itu dan menggantinya dengan tebusan, maka itu dapat dibenarkan.³⁶

Di dalam hadis riwayat Tirmidzi menyatakan bahwa: “Barangsiapa yang menjadi keluarga korban terbunuh maka dia memilih dua pilihan, bisa memilih memaafkannya dan bisa membunuhnya.” (HR Tirmidzi No. 1409).

Penjelasan mengenai hadis di atas menunjukkan bahwa wali (keluarga) korban pembunuhan dengan sengaja memiliki pilihan untuk membunuh pelaku bila menghendakinya, bila tidak bisa memilih diyat dan pengampunan. Pada dasarnya,

³⁵Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 27.

³⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishb h: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol. I* (Cet. 1; Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 368.

pengampunan lebih utama selama tidak mengantar pada kerusakan atau kemaslahatan lainnya.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibn Abbas, beliau berkata bahwa yang dimaksud dengan *al-afw* (memaafkan) adalah menerima diyat sebagai ganti hukum *qish sh*. Adapun *Ittib ' bil Ma'r f* (mengikuti dengan cara yang baik) adalah menuntut ganti diyat dengan cara yang baik dan orang yang membunuh membayar diyat dengan cara yang baik pula. Tidak ada perbedaan dalam kewajiban *qish sh* antara laki-laki dan perempuan, seperti dalam QS al-M 'idah/5: 45.

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ...

Terjemahnya:

“Dan kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa...”³⁷

Kata () *qish sh* terambil dari kata *qashsha*, yang pada mulanya berarti “mengikuti jejak”. Seorang yang melakukan satu kejahatan, maka ia dibalas serupa dengan kejahatan yang dilakukannya, seaklan-akan yang membalas mengikuti jejak pelaku kejahatan itu. Ayat ini hanya berbicara tentang tindak kriminal yang disengaja, tidak tang berbentuk keliru/tidak disengaja. Ini karena konteks kecaman terhadap Bani Israil adalah konteks perbuatan kriminal yang disengaja.³⁸

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. mengatakan barangsiapa yang ahli warisnya dibunuh, dia berhak memilih dua pilihan yaitu dia boleh menuntut pembunuhannya dibunuh atau membayar diyat.

³⁷Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 115.

³⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishb h: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol. III*, h. 101.

Imam Ath-Thabrani meriwayatkan dari Amr' bin Hazm Al-Anshari bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Jika (ahli waris) memaafkan orang yang membunuh, pembunuh wajib membayar diyat *mughallazhah* (diat berat) yang diambil dari harta pembunuh.”³⁹

Imam Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Umar, mereka berkata karib kerabat tidak ikut menanggung diyat pembunuhan yang disengaja, tidak ikut menanggung diyat pembunuhan keluarga terbunuh, dan tidak ikut menanggung pembunuhan yang ditetapkan berdasarkan pengakuan pembunuhan tanpa bukti, tidak pula menanggung pelanggaran yang dilakukan oleh hamba sahaya.⁴⁰

Imam Malik meriwayatkan dalam kitab *Al-Muwath'* dari Ibnu Syihab, beliau berkata “Menurut sunnah Rasulullah saw, karib kerabat tidak ikut menanggung diyat pembunuhan yang disengaja, kecuali jika mereka menghendakinya. Karib kerabat adalah kabilah orang yang membunuh beserta keluarga dekatnya, meliputi orang-orang yang biasa dijadikan tempat meminta pertolongan dan sebaliknya.”

Apabila *qish sh* tidak memenuhi syarat-syarat pelaksanaannya maupun mendapatkan maaf dari keluarga korban, maka hukuman penggantinya adalah dengan membayar diyat berupa 100 (seratus) ekor unta ke keluarga korban. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah saw. kepada penduduk Yaman, “Sesungguhnya barangsiapa yang membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang sah dan ada sanksi, dia harus diqish sh kecuali apabila keluarga korban merelakan (memafkan) dan sesungguhnya dalam menghilangkan nyawa harus membayar diyat berupa 100 ekor unta.” (HR Abu Daud Al-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban dan Ahmad).⁴¹

³⁹Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 278.

⁴⁰Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, h. 279.

⁴¹Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, h. 280.

Walaupun sudah ada hukuman pengganti yang berbentuk diyat namun, dalam pelaksanaannya diserahkan kembali keluarga korban, apakah akan menuntut hukuman diyat itu atau tidak namun pelaku akan tetap dikenai hukuman tambahan atau kifarat yang merupakan hak dari Allah. Bentuk pertama dari hukuman kifarat adalah memerdekakan hamba sahaya dan bila tidak melakukannya maka wajib menggantinya dengan puasa 2 (dua) bulan berturut-turut dan hukuman kedua dari kifarat ini adalah kehilangan hak mewarisi dari yang dibunuhnya. Sesuai dengan hadis Nabi saw. “Si pembunuh tidak boleh mewarisi harta orang yang dibunuhnya. (HR An-Nasa’i dan Daruquthni).” Di dalam pembunuhan sengaja ini, diyat dipikul oleh pelaku sendiri dan pembayarannya dilakukan secara tunai tidak boleh diangsur.

2. Hukuman pembunuhan semi sengaja (*qatl l syibh l ‘amdi*)

Apabila seseorang bermaksud melukai orang lain dengan alat yang biasanya tidak dapat membunuh, tetapi orang yang dilukai terbunuh. Pembunuhan ini tidak menyebabkan *qish sh*, tetapi wajib membayar diyat *mughallazhah* (diyat yang diperberat).

Ibnu Majah, Abu Dawud meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bahwa Nabi saw bersabda, “Ingatlah, sesungguhnya diyat kekeliruan itu menyerupai pembunuhan sengaja seperti pembunuhan dengan cambuk dan tongkat adalah 100 (seratus) ekor unta, di antaranya 40 (empat puluh) ekor yang di dalam perutnya ada anaknya (sedang bunting).” (HR. Abu Daud, Nasa’i, Ibnu Majah dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban).⁴²

Hukuman tambahan atau kifarat terhadap pembunuhan semi sengaja disini adalah memerdekakan hamba sahaya dan dapat diganti dengan berpuasa selama 2

⁴²Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, h. 281.

(dua) bulan berturut-turut. Jika hukuman diyat gugur karena adanya pengampunan, maka pelaku akan dikenakan hukuman *ta'zir* yang diserahkan kepada hakim yang berwenang sesuai dengan perbuatan pelaku. Hukuman tambahan pada pembunuhan semi sengaja sama dengan hukuman tambahan pada pembunuhan sengaja yaitu tidak dapat mewarisi dari orang yang telah dibunuhnya. Di dalam pembunuhan semi sengaja ini, diyat dibebankan kepada keluarga pelaku atau aqilah dan pembayarannya dapat diangsur selama 3 (tiga) bulan.

3. Hukuman pembunuhan tidak disengaja (*qatl khatth* ')

Apabila seseorang melempar sesuatu dan mengenai orang lain, kemudian menyebabkannya terbunuh, pembunuhan jenis ini tidak menyebabkan adanya *qish sh*. Dia hanya diwajibkan membayar diyat *mukhaffafah* (diyat ringan) kepada ahli waris terbunuh. Allah swt. berfirman dalam QS an-Nis /4: 92.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

“Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan

kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”⁴³

Menurut Quraish Shihab dalam tafsir *Al-Mishbah*, ayat ini tidak saja melarang seorang mukmin yang lain, tetapi larangan tersebut sedemikian kuat, sehingga dinyatakan bahwa; *Dan tidak layak*, sehingga tidak pernah akan terjadi *bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain*. Kalau terjadi, maka hal tersebut tidak lain *kecuali karena tersalah*, yakni tidak sengaja, *dan barangsiapa membunuh seorang mukmin kecil atau dewasa, pria atau wanita karena tersalah maka (wajiblah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang mukmin walau dengan jalan menjual harta bendanya untuk memerdekakannya, serta membayar diyat yang diserahkan dengan baik-baik, mudah, dan tulus kepada keluarganya*, yakni keluarga si terbunuh itu, *kecuali jika mereka bersedekah*, yakni keluarga terbunuh itu membebaskan pembunuh dari kewajiban membayar diyat. *Jika ia yakni si terbunuh, dari kaum yang memusuhi kamu, padahal ia yang terbunuh mukmin, maka (wajiblah si pembunuh) memerdekakan hamba-sahaya yang mukmin. Dan jika ia, si terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai dan tidak saling menyerang antara mereka dengan kamu, maka (wajiblah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya*, yakni keluarga si terbunuh *serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin*.⁴⁴

Penggalan redaksi ini dipahami oleh sementara ulama sebagai berdiri sendiri untuk menjadi pendahuluan bagi ketentuan hukum yang akan datang menyangkut pembunuhan mukmin dengan sengaja, sekaligus untuk menggambarkan betapa buruk pembunuhan itu. Dengan demikian, pengecualian yang menyusul redaksi di atas merupakan pengecualian menyangkut segala situasi dan keadaan, yakni tidak ada

⁴³ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 93.

⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishb h: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol. II*, h. 525-526.

pembunuhan mukmin terhadap mukmin yang lain, dalam segala kondisi dan situasi apapun kecuali satu keadaan, yaitu keliru, tanpa sengaja.⁴⁵

Jadi dapat dipahami bahwa dari penjelasan hukuman keringanan tersebut dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek, yaitu:

1. Kewajiban pembayaran dibebankan kepada aqilah (keluarga).
2. Pembayaran dapat diangsur selama 3 (tiga) tahun.
3. Komposisi diyat dibagi menjadi 5 (lima) kelompok :
 - a. 20 ekor anak sapi betina, berusia 1-2 tahun
 - b. 20 ekor sapi betina yang sudah besar
 - c. 20 ekor sapi jantan yang sudah besar
 - d. 20 ekor unta yang masih kecil, berusia 3-4 tahun
 - e. 20 ekor unta yang sudah besar, berusia 4-5 tahun.

Hukuman pokok lainnya adalah dengan memerdekakan hamba sahaya atau diganti dengan berpuasa 2 (dua) bulan berturut-turut dan hukuman tambahan adalah tidak dapat mewarisi harta dari orang yang telah dibunuhnya walaupun pembunuhannya karena kesalahan yang tidak disengaja.⁴⁶

Sanksi dalam hukum pidana Islam terkesan tampak hati-hati. Karena pelaku dan korban harus mendapat hukuman seadil-adilnya. Seperti dalam tindak pidana pembunuhan ini, dijelaskan sangat detail terkait kompensasi yang didapat oleh masing-masing pihak. Oleh sebabnya, sanksi dalam hukuman ini mengajarkan kepada manusia bahwa dalam hukum pidana Islam, ketentuannya adalah setiap pelaku yang melakukan kejahatan pembunuhan, harus dilihat alasan atau dasar ia melakukan tindak pidana agar dapat dihukum sesuai dengan apa yang diperbuatnya.

⁴⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishb h: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol. II*, h. 526.

⁴⁶Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, h. 283.

BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM

TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK DI BAWAH UMUR

OLEH ORANG TUANYA

A. *Persamaan antara KUHP dan Hukum Pidana Islam*

Pada dasarnya tujuan dari keberadaan KUHP dan hukum pidana Islam (HPI) adalah memberikan kedamaian dan keamanan serta melindungi kepentingan masyarakat. Penerapan hukuman pada HPI dan KUHP adalah dengan tujuan agar dapat mengendalikan situasi dan masyarakat serta untuk menimbulkan kesadaran masyarakat serta untuk menimbulkan kesadaran bagi para pelakunya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Persamaan selanjutnya antara KUHP dan HPI yaitu sama-sama menaruh perhatian yang cukup besar mengenai kejahatan terhadap nyawa atau yang dapat kita sebut dengan tindak pidana pembunuhan. Hukum pidana Islam mengatur dan membahasnya dengan sangat rinci sekali dari mulai bentuk-bentuk, unsur-unsur sampai dengan kepada sanksi hukumannya.

Begitu juga KUHP, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XIX tentang Kejahatan Terhadap Nyawa, di dalam pasal tersebut terdapat 13 pasal yaitu mulai pasal 338 sampai pasal 350 yang membahas mengenai kejahatan ini dan lebih khusus lagi dalam pasal-pasal tersebut lebih mengatur tentang tindak pidana pembunuhan anak yang dijabarkan dengan cukup rinci.¹ Selain itu, dalam ketentuan hukum pidana Islam dan KUHP, menanggapi kejahatan terhadap nyawa pada pembunuhan terhadap anak-anak sama-sama mendapatkan hukuman yang tegas.

¹Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 122.

Di bawah ini, analisis persamaan jika dispesifikkan yaitu:

1. Jika dilihat dari pengertiannya antara KUHP dan Hukum pidana Islam adalah:
 - a. Sama-sama memberikan pengertian atau penjelasan dengan tujuan yang sama yaitu agar seseorang berperilaku dengan baik dan benar.
 - b. Sama-sama memberikan penjelasan agar kesadaran seseorang tetap terjaga.
 - c. Sama-sama membahas secara rinci mulai dari adanya bentuk-bentuk tindak pidana pembunuhan sampai pada sanksi hukuman bagi tiap-tiap tindak pidana pembunuhan.
2. Jika dilihat dari bentuk-bentuk tindak pidana pembunuhan menurut KUHP dan hukum pidana Islam adalah :
 - a. Sama-sama menjelaskan macam-macam atau bentuk-bentuk dalam tindak pidana pembunuhan baik dalam prespektif hukum pidana Islam maupun KUHP.
 - b. Baik dalam KUHP maupun hukum pidana Islam, sama-sama memiliki bentuk pembunuhan sengaja sebagai bentuk kejahatan yang diberi hukuman pokok.
3. Jika dilihat dari sanksi-sanksi yang ada di dalam tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana Islam dan KUHP adalah :
 - a. Adanya sanksi dalam tindak pidana pembunuhan menurut KUHP dan hukum pidana Islam adalah sama-sama bertujuan sebagai norma hukum dan sebagai alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku dan agar tidak menyepelekan setiap tingkah laku.²
 - b. Sanksi dalam KUHP dan hukum pidana Islam memiliki tujuan yang sama yakni untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana pembunuhan agar tidak mengulangi kejahatannya.

²Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), h. 191.

B. Perbedaan antara KUHP dan Hukum Pidana Islam

Perbedaan antara hukum pidana Islam dan KUHP antara lain dalam tinjauan umum dari tindak pidana pembunuhan. Di dalam hukum pidana Islam, tindak pidana tersebut kurang mencerminkan keadilan dan ketegasan dalam upaya penerapannya, di mana dalam hukum pidana Islam ini hukuman utamanya adalah *qish sh* atau balasan setimpa dengan apa yang telah dia perbuat kepada orang lain, namun kali ini di dalam salah satu syarat wajib *qish sh* mengatakan bahwa, orang tua tidak dihukum dengan sebab membunuh anaknya jadi hukuman dalam tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya menurut hukum pidana Islam ini tidak dihukum. Jika dibandingkan dengan KUHP dapat dikatakan bahwa, di dalam KUHP sudah mencerminkan keadilan dan ketegasan dalam upaya penerapan hukuman tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya. Di mana di dalam hukuman utamanya akan dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun penjara.

Perbedaan berikutnya yaitu di dalam hukum pidana Islam sendiri masih ada juga perbedaan pendapat para ulama mengenai tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya. Para jumhur ulama berpendapat bahwa orang tua tidak di *qish sh* dengan sebab membunuh anaknya, akan tetapi menurut Imam Malik beliau mengatakan tetap di *qish sh* bagi orang tua yang membunuh anaknya, dan tidak di *qish sh* ketika pembunuhan tersebut tidak disengaja, yang dengan tujuan untuk memberikan pelajaran agar orang tua tidak dengan semena-mena membunuh anaknya.

Sedangkan menurut hukum pidana nasional, pembunuhan anak sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sampai pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hampir semua peraturan tersebut

lebih banyak membahas mengenai pembunuhan atau penganiayaan terhadap anaknya. Hal ini dapat terjadi terhadap anak dapat dikarenakan oleh beberapa hal, seperti upaya orang tua untuk mendidik anaknya, pelampiasan amarah yang disebabkan karena tuntutan ekonomi, kenakalan anak, kelahiran anak yang tidak diinginkan, dan lain sebagainya.³

Mengenai sanksi hukumannya, menurut hukum pidana Islam tidak *diqish sh* bagi orang tua yang membunuh anaknya, namun firman Allah swt. di dalam QS al-M 'idah/5: 45.

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Terjemahnya:

“Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada *qishash*-nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak kisas)-nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka itulah orang-orang zalim.”⁴

Menurut Quraish Shihab mengenai ayat ini yakni seorang yang melakukan satu kejahatan, maka ia dibalas serupa dengan kejahatan yang dilakukannya, seakan-akan yang membalas mengikuti jejak pelaku kejahatan itu.⁵

Akan tetapi menurut KUHP, seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa hukuman pokok dalam pembunuhan ini masuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum

³Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h. 55.

⁴Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 115

⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishb h: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol. III* (Cet. I; Jakarta: Lentera hati, 2001), h. 101.

pidana pasal 338 dapat juga dalam pasal 80 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, Jadi pada intinya KUHP memandang semua perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain itu tetap dikatakan tindak pidana pembunuhan dan tetap dikenakan sanksi.⁶

Untuk itu, antara KUHP dan hukum pidana Islam berbeda pandangan mengenai masalah tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya. Dalam hukum pidana Islam karena hal ini kasus pembunuhan maka masuk dalam hal *qish sh* dan di dalam syarat wajib *qish sh* mengatakan orang tua tidak dihukum dengan sebab membunuh anaknya. Tetapi di dalam ayat suci al-Qur'an disebutkan dalam QS al-Ma'idah/5: 45.

...أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ...

Terjemahnya:

“.....bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa...”⁷

Sedangkan dalam QS al-Baqarah/2: 178 Allah berpesan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ...

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qish sh* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh...”⁸

Di dalam QS an-Nis ' /4: 92.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ...

Terjemahnya:

⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (Bandung : Citra Umbara, 2012), h. 78 .

⁷Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 115.

⁸Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 27

“Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran.”⁹

Artinya dari beberapa dalil yang terdapat di dalam al-Qur'an mengenai kejahatan pembunuhan tersebut tetap diberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana pembunuhan yakni hukuman *qish sh*.

Sebaliknya dalam KUHP semua perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain, maka orang tersebut tetap menjadi pelaku tindak pidana, dan akan dihukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Di mana Undang-Undang pokok yang mengatur tindak pidana terhadap nyawa yaitu masuk dalam Bab XIX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mulai pasal 338-350.¹⁰

Akan tetapi di sini tidak dibahas tentang pandangan KUHP, tetapi membahas mengenai pandangan Hukum pidana Islam. Maka dari itu dalam kasus di atas, pelaku tetap dihukum sesuai dengan ayat al-Qur'an yang menyatakan *al-n fs bi al-n fs* yaitu nyawa dibalas dengan nyawa. Dan adanya suatu hadits itu karena sebagai penjelas atau pelengkap dari adanya ayat-ayat al-Qur'an, maka peneliti tetap mengacu pada al-Qur'an, yang salah satunya menyatakan nyawa dibalas dengan nyawa. Karena dalam kenyataan yang sering terjadi yaitu kasus pembunuhan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya, jika menerapkan salah satu syarat wajib *qish sh* yang menyatakan orang tua tidak dihukum dengan sebab membunuh anaknya, maka kejahatan-kejahatan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya semakin banyak terjadi.

⁹Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 93

¹⁰Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 122-125.

Dan karena saat ini negara mengacu pada undang-undang, maka harus menerapkan dan menghormati apa pun kebijakan yang telah ditetapkan seperti halnya undang-undang. Sedangkan di dalam pasal 338 KUHP menyatakan dengan tegas bahwa barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan akan dipidana penjara paling lama lima belas tahun. Di dalam pasal 341, 342, 346, dan 351 dari pasal-pasal berikutlah hukuman penjara pembunuhan anak dijelaskan. KUHP menganggap tindak pidana pembunuhan sebagai urusan pribadi yang hanya berhubungan dengan individu dan tidak berhubungan dengan masyarakat. Oleh karenanya dalam KUHP apabila pembunuhan tersebut dilakukan dengan sengaja, maka pelaku tersebut dikenakan sesuai dengan Undang-Undang yang ada.

Untuk itu perumusan mengenai kebijakan KUHP mendatang adalah ditegakkannya hukuman-hukuman yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang supaya pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan orang tua kepada anaknya tidak terjadi lagi. Itulah alasan-alasan dari kasus di atas, dan lebih mengarah pada tetap dihukumnya bagi pelaku tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya, meskipun dalam ketentuan hukum *qish sh* dalam pembunuhan sengaja menyatakan, tidak dihukum ketika orang tua membunuh anaknya, akan tetapi bagi pelaku tindak pidana tersebut harus dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara Indonesia. Karena jika seluruh manusia menerapkan sanksi hukuman *qish sh* di zaman sekarang ini, maka akan banyak terjadinya tindak pidana pembunuhan ataupun tindak pidana yang lain. Namun hidup ini juga tidak lepas dari yang namanya suatu hukum, di mana adanya suatu hukum, maka hidup akan ada aturan-aturan yang akan mengarahkan tingkah laku setiap orang untuk berlaku lebih baik.

Untuk itulah mengapa peneliti tetap mengacu pada dipidananya bagi pelaku tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya, yaitu dengan pidana pokok penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Di bawah ini, analisis perbedaan di atas jika dispesifikkan adalah :

1. Jika dilihat dari pengertiannya antara hukum pidana Islam dan KUHP adalah :

- a. Hukum Pidana Islam

Tidak menjelaskan adanya batasan usia anak (kedudukan seseorang dan tidak dibatasi oleh usia).

- b. KUHP

Menjelaskan adanya batasan usia pada anak seperti dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (4) : Anak yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

2. Jika dilihat dari bentuk-bentuk tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana Islam dan KUHP adalah:

- a. Hukum Pidana Islam

- 1) *Q t l 'Amdī* (Pembunuhan Sengaja).
- 2) *Q t l Syibh l 'Amdī* (Pembunuhan Semi Sengaja).
- 3) *Q t l Khatt ' (Pembunuhan Tidak Sengaja).*

- b. KUHP

- 1) Pembunuhan anak biasa dalam bentuk pokok.
- 2) Pembunuhan anak berencana.
- 3) Aborsi.

4) Pembunuhan anak yang didahului/disertai dengan penganiayaan.

3. Jika dilihat dari sanksi-sanksi yang ada dalam tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana Islam dan KUHP adalah:

a. Hukum Pidana Islam

1) Secara Umum:

- a) *Q t l 'Amdī* (Pembunuhan Sengaja): *qish sh* (balasan yang setimpal).
- b) *Q t l Syibh l 'Amdī* (Pembunuhan Semi Sengaja): *diyat mughallazhah* (diyat yang diperberat).
- c) *Q t l Khatt ' (Pembunuhan Tidak Sengaja): diyat mukhaffafah* (diyat yang ringan).

2) Menurut jumhur Ulama:

- a) Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ja'fari, Imam Hambali sependapat dengan hadis at-tirmidzi: orang tua tidak dihukum dengan sebab membunuh anaknya. Dengan tujuan untuk mendidik.
- b) Imam Malik: Pembunuhan sengaja, *qish sh* berlaku dan pembunuhan tidak sengaja: *qish sh* tidak berlaku akan tetapi membayar diyat mughalladzah (diyat yang diperberat).

b. KUHP

Secara umum seseorang yang merampas nyawa orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun (pasal 338).

- 1) Pembunuhan anak biasa dalam bentuk pokok dipidana penjara paling lama 7 tahun (pasal 341).
- 2) Pembunuhan anak berencana dipidana penjara paling lama 9 tahun (pasal 342).
- 3) Aborsi dipidana penjara paling lama 4 tahun (pasal 346).

- 4) Pembunuhan anak yang didahului/disertai dengan penganiayaan dipidana penjara paling lama 7 tahun dan ditambah pemberatan 1/3 dari ancaman awal (pasal 351). Di dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 80 ayat (3) yaitu dipidana penjara selama 10 tahun dan/atau denda Rp 200.000.000,- dan diperberat 1/3, jika pelaku orang tuanya (pasal 80 ayat 4).

Dari analisis perbandingan antara KUHP dan hukum pidana Islam mengenai tindak pembunuhan anak di bawah umur oleh orang tuanya didapat berbagai hal yang menjadi kelebihan dan kekurangan masing-masing hukum. Seperti dalam pemberian sanksi, kelebihan KUHP dalam menjamin hak yang dimiliki oleh korban adalah walaupun pelaku tindak pidana pembunuhan telah mendapatkan maaf dari keluarga, proses pemidanaan harus tetap diteruskan dan pelaku pidana tetap dihukum.

Begitu juga dalam hukum pidana Islam, meskipun terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai apakah ayah dalam hal ini orang tua yang membunuh anaknya mendapat hukuman *qish sh* atau tidak, tetapi, Imam Malik tetap berpegang teguh pada keadilan. Yakni nyawa dibalas dengan nyawa, meski yang membunuh adalah orang tua kandung. Oleh sebabnya, jika orang tua dengan sengaja membunuh anaknya, maka orang tua itu harus tetap mendapatkan hukuman *qish sh*. Di sinilah sisi kelenturan hukum Islam yang melihat masalah secara universal. Dan dari sini pula membuktikan bahwa hukum Islam sesuai dengan zaman dan dapat diterapkan di dalam berbagai sisi kehidupan, yang menyangkut kemaslahatan seluruh umat manusia. Meskipun pada kenyataannya, Negara Indonesia belum menerapkan hukum Islam secara kaffah (keseluruhan). Sehingga, setiap aturan yang ada, harus tetap mendapatkan putusan dari yang berhak mengeluarkannya seperti hakim, dan aparat penegak hukum lainnya. Seperti dalam hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan anak di bawah umur yang dilakukan oleh orang tuanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dijabarkan oleh peneliti mengenai Studi Perbandingan antara KUHP dan Hukum Pidana Islam tentang Tindak Pidana Pembunuhan Anak di Bawah Umur oleh Orang Tuanya dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya menurut KUHP adalah seseorang yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain, menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja atau tidak disengaja, maka seseorang tersebut akan diancam dan dijatuhi dengan hukuman pidana sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan secara yuridis pembunuhan diatur dalam KUHP Bab XIX yaitu kejahatan terhadap nyawa pasal 338 sampai 350 dan dapat juga dilihat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak seperti pada pasal 80 ayat (3) dan ayat (4). Untuk itu perumusan mengenai kebijakan KUHP mendatang adalah ditegakkannya hukuman-hukuman yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang supaya pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan orang tua kepada anaknya tidak terjadi lagi.
2. Tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya menurut hukum pidana Islam adalah masuk ke dalam Bab Jinayat, yaitu membunuh orang, melukai seseorang, memotong anggota tubuh, dan menghilangkan manfaat badan. Misalnya menghilangkan salah satu panca indra. Jadi dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya bertujuan untuk

menghilangkan nyawa atau menghilangkan manfaat dari anggota badan anaknya. Bentuk-bentuk serta tindak pidana dalam hukum pidana Islam yaitu Pembunuhan sengaja atau *qatl 'amdi* sanksinya adalah hukuman *qish sh*. Pembunuhan semi sengaja atau *qatlul syibhul 'amdi* dalam pembunuhan ini hukumannya membayar *diyat mughallazhah* (diyat yang diperberat) seperti membayar 100 ekor unta 40 diantaranya lagi hamil; dan pembunuhan tidak disengaja *qatl khatth* ' pembunuhan jenis ini hukumannya yaitu wajib membayar *diyat mukhaffafah* (diyat ringan) kepada ahli waris terbunuh, yaitu membayar 100 ekor unta. Namun hukuman pokok dalam tindak pidana pembunuhan adalah *qish sh*; di mana *qish sh* adalah balasan setimpal yang diberikan kepada pelaku tindak pidana, yang apabila dimaafkan oleh keluarga korban, maka hukuman penggantinya adalah diyat, dan jika sanksi *qish sh* dan diyat itu dimaafkan maka akan ada hukuman *ta'zir*.

3. Analisis perbandingan mengenai penerapan hukuman pada KUHP dan hukum pidana Islam adalah memiliki perbedaan yang pokok yakni jika yang dilihat menurut KUHP sudah jelas bahwa hukuman pokok pada tindak pidana pembunuhan yaitu dipidana paling lama 15 tahun. Sedangkan di dalam hukum pidana Islam, memiliki beberapa pembagian yang dilihat dari sebab pelaku melakukan pembunuhan. Selain itu, juga terdapat hadis yang mengatakan tidak dihukumnya ketika orang tua yang membunuh anaknya. Akan tetapi meskipun ada banyak pandangan, hukum pidana Islam tetap memberikan perhatian besar pada pembunuhan anak dengan hadirnya pendapat dari Imam Malik. Inilah yang membuktikan bahwa baik KUHP maupun hukum pidana Islam sama-sama menjunjung nilai-nilai kemanusiaan yang universal.

B. Implikasi Penelitian

1. Diharapkan perhatian dari pemerintah dalam hal tindak pidana pembunuhan ini, serta kepada aparat Hukum agar senantiasa dapat merealisasikan sanksi yang terdapat di dalam KUHP Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa dan dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sehingga kejadian orang tua yang membunuh anaknya karena berbagai macam faktor dapat segera teratasi.
2. Kepada seluruh masyarakat, ada baiknya jika kontak sosial terhadap sesama lebih ditingkatkan, supaya tolong menolong antar sesama terjalin dengan baik serta ilmu-ilmu agama diterapkan pada diri setiap manusia dan penanaman nilai-nilai agama di lingkungan masyarakat tetap berjalan supaya setiap individu tidak ada yang mempunyai sifat untuk melakukan tindak pidana. Walaupun di dalam ketentuan hukum *qish sh* mengatakan tidak dibunuhnya ketika orang tua yang membunuh anaknya, akan tetapi jika tidak mendapatkan hukuman maka akan sering terjadi kejahatan-kejahatan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya saat ini dan masa yang akan datang. Selain itu agar setiap manusia tetap bisa menghargai adanya seorang anak, dan tidak ada kasus pembunuhan anak oleh orang tuanya.
3. Dalam sanksi yang diberikan oleh masing-masing hukum memang memiliki persamaan dan perbedaan, dilihat dari konteks di mana hukuman itu direalisasikan dan dilihat alasan yang melatarbelakangi perbuatan kejahatan itu terjadi. Kali ini peneliti tetap mengacu pada ditegakkannya suatu hukuman bagi pelaku tindak pidana sesuai yang berlaku di dalam KUHP dan Undang-Undang. Alasan yang mendasari hal itu adalah pertama karena sistem negara

ini sudah tidak lagi menerapkan sistem pemerintahan Islam yang mana jika ada tindak pidana tidak dihukum secara Islam namun dihukum menurut Undang-Undang. Oleh karenanya, kita harus mematuhi peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang dan alasan yang kedua karena jika kebijakan suatu hukum tidak diberlakukan maka akan terjadi lagi perbuatan-perbuatan pidana yang lain. Jika kesadaran akan hukum sudah membudaya di dalam setiap individu, maka kejadian seperti pembunuhan anak di bawah umur bisa segera teratasi. Sanksi yang diberikan oleh KUHP dan Undang-Undang perlindungan anak harus benar-benar tepat sasaran. Serta dalil mengenai nyawa harus dibalas dengan nyawa menjadi dasar utama dalam pemberian sanksi kepada pelaku pembunuhan jika pemerintah menggunakan sistem hukum Islam. Sebab antara KUHP dan hukum pidana Islam selayaknya memiliki hukuman yang dapat memberikan efek jera yang menyadarkan setiap individu bahwa melakukan tindak pidana pembunuhan anak di bawah umur sama artinya dengan membunuh diri sendiri. Baik dalam KUHP maupun hukum pidana Islam, nilai kemanusiaan sangat dijunjung tinggi sehingga penerapan sanksi dalam hukuman pembunuhan anak di bawah umur dapat memberikan rasa keadilan yang seimbang. Bukan persolan apakah pelaku merupakan orang tua dari korban, akan tetapi dilihat dari sisi keadilan kemanusiaan. Bahwa yang membunuh harus tetap mendapatkan balasan setimpal terhadap apa yang telah diperbuatnya. Dalam hukum pidana Islam, penjatuhan hukuman mati atau hukuman penjara kepada pelaku didasarkan pada i'tikad baik. Dan di dalam KUHP atau hukum pidana nasional, untuk memberikan rasa keadilan sangat ditentukan oleh putusan hakim.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyr ' Al-Jina y Al-Isl m y*. Beirut: D r Al-kit b Al-ar bi, t.th.
- Al-Darqutni, Ali bin 'Umar bin Ahmad bin Mahdi. *Sunan al-Darqutni*, Juz 4. Bairut: Muassasah al-Risalah, 2004.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Al-Quzwaini, Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibn Majah*, Juz 3. t.tp.: Muassasah al-Risalah al-'Alamiah, 2009.
- Apeldorn, LJ. van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. XXXIII; Jakarta: Pradnya Paramita, 2013.
- Burhanuddin. "Pemenuhan Hak-hak Dasar Anak dalam Perspektif Hukum Islam". 'Adliya 8, no. 1 (2014): h. 285-300.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Darwan, Prinst. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.
- Hasan, Hamzah. *Hukum Pidana Islam I*. Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Hasan, Mustofa. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Huda, Chairul. *Dari Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2011.
- Jazuli, A. *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Kementerian Agama RI. *Alqur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: UD. Halim, 2010.
- Kurniati. *HAM dalam Perspektif Syari'ah dan Deklarasi PBB*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Kusuma, Hilman Hadi. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, 1992.
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997.
- Lamintang, P.A.F.. *Delik-delik Khusus*. Cet. I; Bandung: Bina Cipta, 1986.
- Makaro, Mohammad Taufik, Letkol Sus, Weny Bukamo, Syaiful Azri. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

- Marlina. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Mubarok, Jaih dan Enceng Arif Faizal. *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Poerwadarminta, W.J.S.. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Cet. V; Jakarta: Balai Pustaka, 1982.
- Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsya. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2015.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.
- Saebani, Beni Ahmad. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Sambas, Nandang. *Peradilan Pidana Anak*. Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Semarang: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al Mishb h: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol. III*. Cet. I; Jakarta: Lentera hati, 2001.
- _____. *Tafsir Al Mishb h: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol. IV*. Cet. I; Jakarta: Lentera hati, 2001.
- _____. *Tafsir al-Mishb h: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol. VII*. Cet. I; Jakarta: Lentera hati, 2002.
- Sholihuddin. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Sianturi, S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem Petehaem, 1996.
- Soemitro, Irma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Soerodibroto, Soenarto. *KUHP*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Sutedjo, Wagiaty. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama, 2006.
- Sudarsono. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.
- Suratman dan H. Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010.

- Tafsir, Ahmad. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994.
- Tim Redaksi Pustaka Yustisia. *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2007
- Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian*. Makassar: Alauddin Press, 2013.
- Widiyanti, Ninik, dan Panji Anoraga. *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya*. Jakarta: Pradya Paramita, 1987.
- Zuhali, Wahbah. *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*. Demaskus: Juz VI Dar al Fikr, 1989.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. “Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” dalam *Undang-Undang Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Penerbit New Merah Putih, t.th.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Bandung: Citra Umbara, 2012.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000.

C. Surat Kabar Online

- Setyawan, Davit. “KPAI: Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Tiap Tahun Meningkat”. *KPAI Online*. <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat> (14 November 2016).
- Suyanto, Bagong. “Penculikan dan Pembunuhan Anak”. *Koran Republika Online*. 12 Februari 2016. <http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/16/02/12/o2ff341-penculikan-dan-pembunuhan-anak> (18 November 2016).

ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Muh. Galang Pratama, lahir di Palu 28 November 1995.

Merupakan anak pertama dari empat bersaudara pasangan Mursalim dan Sitti Rahmatiah. Pendidikannya ditempuh mulai dari SD Negeri 7 Batangkaluku Gowa tahun 2001-2007 kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada SMP/MTs Aisyiyah Sungguminasa (2007-2008) dan pada MTsN Binanga Mamuju (2008-2010). Lalu pada tahun 2010 ia melanjutkan di SMA Negeri 1 Mamuju hingga pada tahun 2013. Di tahun yang sama ia melanjutkan jenjang Strata Satu (S1) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (HPK). Pada jenjang tersebut di samping aktivitas kuliahnya, ia juga aktif di beberapa organisasi ekstra dan intra kampus. Di antaranya sebagai ketua bidang keilmuan dan penalaran Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) HPK periode 2014-2015, ketua sekaligus salah satu pendiri Lembaga Informatika Syariah dan Hukum (LISH) Fakultas Syariah dan Hukum periode 2016-2017 (www.jurnalish.com), dan pada tahun 2016-2017 ia terpilih menjadi ketua *IGSHA Community* (igsha.or.id), sebuah lembaga non profit yang bergerak di bidang sosial serta aktivitas lainnya seperti staf pengelola Jurnal Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan dan menulis esai di media massa.